ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

Tahun Anggaran 1999/2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2003

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh :

Astherina Vendayanti

NIM : 992114266

NIRM : 990051121303120265

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2004

Skripsi

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 1999/2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2003

Oleh :
Astherina Vendayanti
NIM: 992114266
NIRM: 990051121303120265

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Firma Sulistiyowati, S.E, M.Si. **Tanggal, 4 Juni 2004**

Pembimbing II

Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt. **Tanggal, 26 Juni 2004**

Skripsi

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 1999/2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2003

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Astherina Vendayanti

NIM : 992114266

NIRM : 990051121303120265

Telah dipertahankan di depan panitia penguji
Pada tanggal 21 September 2004
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan panitia penguji

	Nama lengkap	**Tanda tangan**
Ketua	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.	.....
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt	.....
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.	.....
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.	.....
Anggota	Drs. P. Rubiyatno, M.M	.....

Yogyakarta, 30 September 2004
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma

Drs. Alex Kahu Lantum, M.Si

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dedicated to:

"Jesus Christ" yang selalu menyertai dan memberkati

Papa dan Mamaku" tercinta yang selalu mendoakan dan memberi

Luv adikku" Ajeng, Intan, Ado" dan keponakan "Ali Gemi"

My Sweety "Bang Ruivel" atas kasih sayang dan motivasi

"Eyangku" tersayang atas

"Tante Ruwa dan seluruh keluargaku" atas dukungan

Teman-teman satu dubaya, Masda, Yenna, Grace,Noni dan Bang Rommel"

MOTTO

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, September 2004

Penulis

Astherina Vendayanti

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 1999/2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2003

ASTHERINA VENDAYANTI
992114266
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2004

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui perkembangan proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah. (2) Mengetahui penerimaan retribusi daerah dari tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2003. (3) Mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2003. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis proporsi, analisis efektivitas dan analisis kontribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah terkadang mengalami kenaikan dan penurunan. (2) Penerimaan retribusi daerah dari tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2003 sudah dapat dikatakan efektif. (3) Kontribusi retribusi daerah kepada Pendapatan Asli Daerah sangat besar, karena hampir seluruh pendapatan daerah diperoleh dari retribusi daerah.

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF THE REGIONAL RETRIBUTION TO THE REGIONAL ORIGINAL REVENUE

Case Study in Temanggung Government

Fiscal Year of 1999/2000 to the Fiscal Year of 2003

ASTHERINA VENDAYANTI

992114266

SANATA DHARMA UNIVERSITY

YOGYAKARTA

2004

This research aimed at (1) knowing the development of the proportion of each retribution to the regional retribution. (2) Knowing the revenue of regional retribution from the fiscal year of 1999/2000 to the fiscal year of 2003. (3) Knowing the contribution of the regional retribution to the Regional Original Revenue from the fiscal year of 1999/2000 to the fiscal year of 2003. The technique of data collecting used observation, interview and the documentation. Whereas the data analysis techniques used were proportion analysis, effectiviness analysis and contribution analysis.

The result of the research suggesting that (1) the proportion of each retribution to the regional retribution experiencing increasing and decreasing. (2)

The regional retribution revenue from the fiscal year of 1999/2000 to the fiscal year of 2003 was effective. (3) The contribution of the regional retribution to the Regional Original Revenue was significant, since almost all of the regional revenue were derived from regional retribution.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala kuasa dan rahmatNya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Program studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan perhatian dari banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. Alex Kahu Lantum, M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Firma Sulistiyowati, S.E, M.Si sebagai dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
3. Ign. Kuntoro Mangunharjo, S.E, Akt sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Y.P Supardiyono, M.Si., Akt sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Kepala dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung yang telah memberikan segala data yang diperlukan dengan sabar.

6. Kepala dan Karyawan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Temanggung yang telah memberikan segala data yang diperlukan.
7. Papa dan Mamaku tersayang, yang telah memberikan bantuan, bimbingan, doa dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Makasih Papa dan Mama, aku sayang kalian.Tanpa kalian aku ngga bisa jadi seperti sekarang ini.
8. Yang terhormat Bapak Harno selaku Kepala Bagian DALGRAM yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan selama proses penyusunan penyusunan skripsi ini.
9. Papa dan Mamaku tersayang, yang telah memberikan bantuan, bimbingan, doa dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Makasih Papa dan Mama, aku sayang kalian.Tanpa kalian aku ngga bisa jadi seperti sekarang ini.
10. Adik-adikku tersayang Ajeng, Intan, Ado dan Kakakku tersayang Bli Gerrit, makasih atas perhatian, canda tawa, doa dan kasih sayangnya. Kalian sungguh sangat berarti bagiku.
11. My Lovely Bang Rutsel, yang udah banyak ngasih semangat untuk senatiasa kuat menyelesaikan semua masalah yang ada *(bereskan satu-satu dulu nduk, pasti akhirnya kelar juga)* makasih juga buat kasih sayang, Cinta, kesabaran dan hari-hari yang indah selama ini.
12. Tante Ruwi makasih buat dukungan, doa, dan kasih sayangnya.Tante merupakan ibu keduaku, tanpa tante aku juga ngga akan jadi seperti sekarang.
13. Eyang Putriku tersayang, Tante dan Oomku *(Tante Ning, Tante Tatik, Tante Nul, Tante Tanti, Oom Toyo, Oom Anto, dan Oom Budi)* makasih untuk

dukungannya. Tante Evi yang sering ngasih semangat untuk tetep selalu kerjain skripsi via sms.

14. Oom Bowo dan Bli Wayan buat doa, dukungan, dan bantuannya karena kalian udah banyak bantuin aku, terutama saat aku jatuh dan patah semangat. Tanpa kalian aku ngga akan sekuat ini menghadapi semua. Mas Made makasih buat dukungannya (mudah-mudahan masih inget aku ya sekarang)
15. Masda (si anak surga), Yonna (si anting berjalan), Noni (si centil) dan Grace (si cerewet n rewel) tersayang, kalian adalah teman, sahabat dan juga saudara-saudara terbaikku di tempat aku belajar. Makasih banyak buat dukungan, bantuan, dan canda tawanya, kalian bener sahabat suka dukaku selama ini.*(I love u guys...)*. Makasih juga buat Lenni yang udah nemenin aku klo aku pas lagi sendirian.
16. Abang-abangku, Bang Romel (*Pak Pen si pendeta gaul*), Bang Tommy makasih udah anggap aku sebagai adik dan makasih udah banyak bantuin aku nyelesaikan masalah-masalahku.
17. Sahabat-sahabatku Maria, Bli Putu, Ngurah, Tangkas, Rama, Agung, Kadek yang selalu nanyain kabar skripsiku lewat sms. Walaupun kalian jauh tapi aku tetep selalu ingat kalian.
18. Keluargaku di sagan GK V/870 (Eyang kakung, Eyang putri, dik Putri, dan Lek'nya). Eyang matur nuwun sudah memberikan tempat untuk hari-hariku.
19. Temanku Ricky (wah akhirnya kita bisa wisuda bareng ya ko!), Dik Sigit, Diana dan Bang Rai, makasih aku udah sering ngerepotin kalian selama ini. Adikku Pira, makasih udah sering numpangin aku PP Temanggung-Yogya.

20. Teman-teman di kost Suropadan 81, mbak Rahma, dik dwi, makasih udah sering nemenin aku tidur karena aku takut tidur sendirian.
21. Teman-teman Akuntansi'99 (Dessy, Novi Ratri, Sinta) terutama teman-teman Akuntansi D (Aji, Anna, Barbara, Woro, Lisa) makasih karena kalian udah banyak aku bantuin belajar dan pinjemin aku buku-buku.
22. Temen-temenku akuntansi'00. Tatik makasih dah dikasih contoh transparansinya. Anggun makasih curhatnya (cepet lulus ya, aku doain kamu). Upik ayo rajin-rajin kuliah ntar kita biar bias kerja sama lagi he..he..
23. Serta semua teman-temanku yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu yang telah banyak membantuku baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.Thanks for all.
24. Thanks buat motorku AA 4641 PE yang sudah mengantarku kemana-mana, makasih juga buat tempat-tempat indah di yogya yang sudah memberikan sejuta kenangan indah buat aku.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya baik dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun akan menerima segala kritik dan saran yang berguna bagi penyempurnaan skripsi ini.

Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan.

Yogyakarta

Penyusun

DAFTAR ISI SKRIPSI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

ABSTRACT ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

DAFTAR TABEL ..... **xvii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan masalah 3

D. Tujuan Penelitian 3

E. Manfaat Penelitian 4

F. Sistematika Pembahasan 4

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah 7

B. Sumber Pendapatan Asli Daerah 8

1. Pajak Daerah 8

2. Retribusi Daerah 9

3. Bagian Laba Usaha Daerah 16

4. Penerimaan Dinas 16

5. Dana Perimbangan 16

6. Pinjaman Daerah 17

7. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 17

C. Efektifitas 17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 19

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 19

C. Subyek dan Obyek Penelitian 19

D. Data Yang Diperlukan 20

E. Teknik Pengumpulan Data 20

F. Teknik Analisis Data 20

BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Sejarah 24

B. Geografis 24

1. Letak 24

2. Batas Wilayah 24

3. Pembagian Wilayah 25

4. Luas Wilayah 26

C. Fasilitas 27

1. Pendidikan 27

2. Kesehatan 27

3. Peribadatan 27

D. Penduduk 28

1. Jumlah penduduk 28

2. Komposisi penduduk 28

3. Kepadatan penduduk 29

4. Angkatan Kerja 30

E. Kekayaan Alam 32

1. Jenis tanah 32

2. Pemanfaatan tanah 32

F. Sumber Daya Alam 32

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Proporsi Masing-Masing Retribusi 33

B. Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah 48

C. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah 52

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 55

B. Keterbatasan Penelitian 56

C. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis-jenis retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung 13

Tabel 3.1 Rencana tabel proporsi jenis retribusi terhadap total retribusi daerah 21

Tabel 3.2 Rencana tabel analisis efektivitas retribusi daerah 22

Tabel 3.3 Rencana tabel analisis trend efektivitas retribusi daerah 22

Tabel 3.4 Rencana tabel kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. 23

Tabel 4.1 Jumlah desa, dusun dan luas kecamatan di Kabupaten Temanggung 26

Tabel 4.2 Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung dirinci menurut jenis kelamin tahun 1999 sampai 2003 28

Tabel 4.3 Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Temanggung menurut jenis kelamin tahun 2002 28

Tabel 4.4 Kepadatan penduduk tahun 2002 30

Tabel 4.5 Data tenaga kerja dan pengangguran tahun 2002 31

Tabel 4.6 Pencari kerja di Kabupaten Temanggung 31

Tabel 4.7 Pemanfaatan tanah 32

Tabel 5.1 Proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah tahun anggaran 1999/2000 34

Tabel 5.2 Proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah tahun anggaran 2000 35

Tabel 5.3 Proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah tahun anggaran 2001 36

Tabel 5.4 Proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah tahun anggaran 2002 37

Tabel 5.5 Proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah tahun anggaran 2003 38

Tabel 5.6 Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung tahun anggaran. 1999 sampai 2003 48

Tabel 5.7 Trend Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung tahun anggaran. 1999 sampai 2003 51

Tabel 5.8 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Temanggung tahun anggaran. 1999 sampai 2003 52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Daftar Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sendiri dan Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak Tahun 1999/2000 sampai dengan 2003
Lampiran 3	Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 1999/2000
Lampiran 4	Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2000
Lampiran 5	Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2001
Lampiran 6	Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2002
Lampiran 7	Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2003
Lampiran 8	Surat Keterangan untuk mengadakan penelitian/survey
Lampiran 9	Surat Keterangan selesai penelitian
Lampiran 10	Surat Keterangan Data

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu landasan bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Untuk memberdayakan perekonomian daerah itu sendiri maka pemerintah pusat memberlakukan salah satu kebijakannya yaitu otonomi daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan daerah menjadi lebih mandiri dalam membiayai rumah tangganya sendiri. Keuangan daerah tidak lagi bergantung pada subsidi pemerintah pusat tapi bergantung pada sumber-sumber keuangan daerah itu sendiri. Dengan demikian maka pemerintah daerah beserta aparaturnya harus mencari dan menggali berbagai potensi yang ada di daerahnya sebagai sumber pemasukan bagi daerah.

Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerahnya sebagai sumber penerimaan daerah akan menentukan keberhasilan pelaksanan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan di bidang keuangan daerah diupayakan pemantapannya searah dengan tujuan jangka panjang pembangunan nasional yaitu agar keuangan daerah semakin berperan dalam meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat serta swasta, dan memperluas kesempatan kerja.

Keuangan daerah diperoleh dari beberapa sumber penerimaan dan menurut Undang-undang No. 25 tahun 1999, sumber utama penerimaan daerah terdiri dari empat sumber yaitu:

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah

Dari keempat sumber penerimaan daerah tersebut yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah di Indonesia masih tergolong rendah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah kurang berperan.
2. Semua pajak utama dan tinggi nilainya ditarik oleh pemerintah pusat.
3. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan hanya sedikit.

4. Kelemahan dalam pemberian subsidi.

Dari keadaan tersebut maka pemerintah daerah harus mengetahui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat memberikan sumbangan tinggi dalam meningkatkan daerahnya, salah satunya adalah dari retribusi daerah. Bertitik tolak dari pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini sehingga dapat mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah?
2. Apakah penerimaan dari retribusi daerah pada tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 sudah efektif?
3. Seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah.
2. Untuk mengetahui apakah penerimaan dari retribusi daerah dari tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2003 sudah efektif.

3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2003

D. Manfaat Penelitian

1. **Bagi Pemerintah Daerah**

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah, terutama dalam hal penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

2. **Bagi Universitas Sanata Dharma**

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan bahan bacaan dan memberi masukan bagi pihak-pihak yang berminat dengan dengan topik retribusi daerah.

3. **Bagi Penulis**

   Dari penelitian ini penulis mendapatkan pengetahuan dibidang keuangan daerah dan dapat menerapakan teori yang diperoleh selama kuliah dengan keadaan sebenarnya.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas tentang otonomi daerah dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada subsidi dari pemerintah

pusat. Selain itu juga dibahas tentang kebijakan pemerintah daerah dalam mengikutsertakan peran masyarakat dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. Dari latar belakang tersebut, dilanjutkan dengan merumuskan masalah tentang proporsi retribusi dan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah serta manfaat penelitian dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini membahas tentang dasar-dasar teori yang dipakai dalam melakukan penelitian. Pembahasan berupa uraian tentang peranan Pendapatan Asli Daerah dan sumber-sumbernya serta dasar hukumnya dalam menunjang perekonomian daerah. Selain itu juga dibahas sekilas tentang pajak dan uraian tentang retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB III: Metode Penelitian

Pembahasan pada bab ini meliputi penjelasan tentang jenis penelitian berupa studi kasus yang dilakukan di tempat penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Temanggung dan uraian tentang waktu penelitian. Pembahasan selanjutnya yaitu obyek penelitian yang berupa data-data retribusi dan data-data Pendapatan Asli Daerah. Kemudian teknik pengumpulan data yang dibahas adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

BAB IV: Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

Pembahasan yang dilakukan meliputi sejarah pembentukan kabupaten Temanggung, kapan terbentuk, batas wilayah, luas wilayah dan sekilas tentang perkembangannya sampai pada saat ini.

BAB V: Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini dibahas mengenai perhitungan proporsi masing-masing retribusi. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan. Kemudian melakukan analisis efektifitas pemungutan retribusi. Selanjutnya menghitung kontribusi masing-masing retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB VI: Penutup

Pada bab ini dibahas kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil setelah hasil penghitungan dan analisa selesai dibuat. Kemudian dari kesimpulan yang ada dapat diberikan saran-saran kepada pemerintah daerah kabupaten Temanggung agar dapat mengantisipasi masalah-masalah yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah

Secara eksplisit dalam penjelasan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah menyatakan sebagai berikut (Penjelasan UU No 5, 1974:102):

> "Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku"

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, pungutan jasa layanan, iuran dari penerimaan lain dinas, laba dari perusahan daerah dan penerimaan pembangunan yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan. (Devas, 1989: 31)

Pendapatan Asli Daerah (Wijaya, 2001: 42) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas.

B. Sumber Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

a. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya peraturan umum pajak daerah ini adalah Undang-Undang No 34 Tahun 2000.

b. Pengertian

Pajak daerah adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah daerah yang dipaksa tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.

c. Jenis-jenis Pajak

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II:

1) Pajak Hotel
2) Pajak Restoran
3) Pajak Hiburan
4) Pajak Reklame
5) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
6) Pajak Penerangan Jalan

d. Ciri-ciri Perpajakan Daerah

1) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibanding ongkos pemungutannya.
2) Relatif stabil.

3) Dasar pengenaan pajak merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan membayar.

4) Balas jasa tidak dapat dinikmati secara langsung.

2. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksa dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan yang dimaksud bersifat ekonomis, karena siapa yang tidak merasakan jasa balik pemerintah maka tidak dikenakan iuran (Munawir, 1992:4)

Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut (Suparmoko, 1992:84)

Besar retribusi yang dipungut adalah hasil perkalian antara tarif retribusi dan jumlah pemakaian jasa. Tarif retribusi sendiri ditentukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan dengan mempertimbangkan faktor kemampuan masyarakat dan keadilan.

Dalam retribusi daerah terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan (Samudra, 1995:50) :

1) Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pemungutan yang dikenakan.

2) Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.

3) Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pemungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

b. Ciri-ciri Pokok Retribusi Daerah (Kaho, 1997:152)

1) Retribusi dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang.
2) Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis.
3) Adanya kontraprestasi (balas jasa) yang secara langsung dapat ditunjuk.
4) Dikenakan dalam setiap orang atau badan yang menggunakan jasa yang disiapkan oleh negara/pemerintah.

c. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Tata cara pemungutan retribusi berdasarkan UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi daerah adalah:

1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Daerah.

d. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 66 tentang retribusi

daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung memungut 3 golongan retribusi:

1) Retribusi Jasa Umum.

Memiliki kriteria :

a) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.

b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c) Jasa yang diberikan memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

e) Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

f) Dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

g) Pungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum antara lain :

a) Retribusi Pelayanan kesehatan

b) Retribusi Pelayanan persampahan

c) Retribusi Pelayanan pemakaman

d) Retribusi Pengabuan mayat

e) Retribusi Pasar

f) Retribusi Pelayanan akte dan KTP

g) Retribusi Parkir tepi jalan umum, dan lain-lain.

2) **Retribusi Jasa Usaha**

Memiliki kriteria :

a) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum dan retribusi perijinan tertentu.

b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta namun belum memadai atau ternyata harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha antara lain :

a) Retribusi terminal umum

b) Retribusi tempat khusus parkir

c) Retribusi rumah potong hewan

d) Retribusi penjualan produk usaha daerah

e) Retribusi tempat rekreasi

f) Retribusi terminal khusus barang

3) Retribusi Perijinan Tertentu

Memiliki kriteria :

a) Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang didasarkan pada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

b) Perijinan tersebut betul-betul diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut atau biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar, sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.

Jenis-jenis retribusi perijinan tertentu adalah :

a) Retribusi ijin mendirikan bangunan

b) Retribusi ijin gangguan

c) Retribusi ijin trayek

d) Retribusi ijin tebang angkut

e) Retribusi ijin usaha kesehatan umum

e. Jenis-jenis Retribusi yang Dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

Tabel 2.1
Jenis-jenis retribusi

No	Jenis Retribusi Daerah	Obyek Pengenaan
1	Pelayanan kesehatan	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh layanan kesehatan pada dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, rumah balai pengobatan.

2	Pelayanan kebersihan/ persampahan	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh layanan pembuangan sampah
3	Penggantian biaya cetak KTP/Akte	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh pelayanan jasa akte dan KTP
4	Pemakaman dan penguburan mayat	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh pelayanan pemakaman
5	Parkir tepi jalan umum	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.
6	Pasar	Dikenakan kepada individu/badan yang menggunakan fasilitas pasar umum.
7	Pengujian kendaraan	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh layanan pengujian kendaraan bermotor.
8	Pemakaian kekayaan daerah	Dikenakan kepada pribadi/badan yang menggunakan fasilitas atau aset milik pemerintah daerah kabupaten Temanggung dan perluasan obyek tersebut seperti seperti sewa mesin gilas, GOR dan sewa bengkok tanah kelurahan.
9	Terminal	Dikenakan kepada individu/badan yang menggunakan fasilitas terminal umum
10	Tempat khusus parkir	Dikenakan kepada individu/badan yang menggunakan tempat khusus

		parkir yang dikelola dan atau milik Pemda.
11	Rumah potong hewan	Dikenakan kepada individu/badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan
12	Tempat rekreasi dan olahraga	Dikenakan kepada individu/badan yang menggunakan fasilitas tempat hiburan/rekreasi milik Pemda.
13	Penjualan produk usaha daerah	Dikenakan kepada individu/badan yang menjual produk usaha kabupaten Temanggung.
14	Ijin mendirikan bangunan	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh fasilitas perijinan bangunan, baik ijin mendirikan maupun merobohkan bangunan.
15	Ijin gangguan	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh pelayanan perijinan gangguan, baik untuk industri, pertokoan, pasar/ pergudangan maupun usaha sosial
16	Ijin trayek	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh pelayanan perijinan trayek, aik ijin trayek baru, perubahan ijin trayek maupun perpanjangan ijin trayek.
17	Ijin tebang angkut	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh pelayanan perijinan untuk melakukan usaha tebang angkut.

18	Perijinan bidang perindag	Dikenakan kepada individu/badan yang bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan.
19	Ijin usaha jasa konstruksi	Dikenakan kepada individu/badan yang menjual jasa konstruksi.

Sumber: DIPENDA Kabupaten Temanggung Tahun 2002

3. Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari BPD, dan Perusahaan Daerah.

4. Penerimaan Dinas

Penerimaan dari dinas-dinas menurut Undang-Undang No 5 tahun 1974 tentang pokok pemerintahan daerah adalah penerimaan dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Misalnya dinas peternakan, dinas kesehatan, dinas kehutanan dan lain-lain.

5. Dana Perimbangan

Yang termasuk dalam dana perimbangan adalah:

a. Bagian dari pajak bumi dan bangunan
b. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
c. Dana alokasi umum (DAU)
d. Dana alokasi khusus (DAK)
e. Penerimaan dari sumber daya alam

6. Pinjaman daerah

a. Pinjaman dari luar negeri

b. Pinjaman dari dalam negeri

7. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan lain-lain yang termasuk di dalamnya adalah :

a. Penerimaan dari dinas-dinas sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Penerimaan dari hasil penjualan barang milik daerah.

c. Penerimaan bunga penyertaan modal.

d. Penerimaan kembali atas anggaran belanja rutin dalam satu tahun anggaran.

e. Sumbangan dari daerah tingkat di atasnya.

C. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara suatu pusat pertanggung-jawaban dengan sasaran yang harus dicapai (Anthony, Dearden dan Bedford, 1993: 203). Efektivitas (hasil guna) digunakan untuk mengukur hubungan antara pemungutan retribusi daerah (realisasi) dan sasaran (target) retribusi daerah. Untuk menentukan efektif tidaknya penerimaan retribusi digunakan asumsi sebagai berikut:

1. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi retribusi daerah) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target retribusi daerah) maka dikatakan penerimaan retribusi daerah semakin efektif.

2. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi retribusi daerah) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target retribusi daerah) maka dikatakan penerimaan retribusi daerah semakin kurang efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus, yaitu peneliti mengadakan penelitian terhadap obyek dan data tertentu pada waktu tertentu. Kesimpulan dari hasil penelitian hanya berlaku bagi obyek yang bersangkutan dan dalam waktu tertentu.

B. Tempat dan waktu Penelitian

1. Penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Pada bulan Maret 2004 sampai dengan Juni 2004

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek penelitian

   Yang menjadi subyek penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)

2. Obyek Penelitian

   Yang menjadi obyek penelitian adalah retribusi daerah dan data Pendapatan Asli Daerah.

D. Data yang diperlukan

1. Gambaran umum Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
2. Data-data pendapatan asli daerah
3. Data-data retribusi daerah

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan peninjauan dan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian sehubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada subyek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data–data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisa Data

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif

1. Permasalahan Pertama

Analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perkembangan proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Proporsi retribusi} = \frac{\text{Besar Retribusi}}{\text{Total Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan :

Proporsi Retribusi : Prosentase jenis suatu retribusi terhadap keseluruhan retribusi daerah

Besar Retribusi : Besarnya suatu jenis retribusi (retribusi pasar, retribusi terminal, dan lain-lain)

Total Retribusi : Jumlah total retribusi daerah pada tahun anggaran tertentu

Tabel 3.1

Rencana Tabel Proporsi Jenis Retribusi Terhadap Total Retribusi Daerah.

No	Jenis Retribusi	Besar Penerimaan Retribusi	Proporsi Retribusi Terhadap Retribusi Daerah %

2. Permasalahan Kedua

Untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi daerah sudah efektif digunakan rumus :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Target retribusi daerah}} \times 100\%$$

Efektifitas retribusi daerah ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rencana Tabel Analisis Efektifitas Retribusi Daerah

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Daerah	Target Retribusi Daerah	Efektifitas (%)

Untuk mengetahui kecenderungan efektifitas penerimaan retribusi daerah selama tahun anggaran yang diteliti maka digunakan trend efektifitas dengan analisis *least square* (Budiyuwono, 1995 : 211-212).

$$Y' = a + bx$$

Keterangan:

Y' = Trend Efektifitas Retribusi Daerah

a = Konstanta yang akan menunjukkan besarnya nilai x=0

b = Variabilitas permintaan x yaitu besarnya perubahan nilai y dari setiap perubahan nilai x

Tabel 3.3

Rencana Tabel Analisis Trend Efektifitas Retribusi Daerah

Tahun anggaran	Tingkat efektifitas (%)	X	XY	X^2	Y' (%)
Jumlah					

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus :

$$a = \frac{\sum Y}{n} \qquad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

3. Permasalahan Ketiga

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Tabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Rencana Tabel Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

Tahun anggaran	Realisasi Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi (%)
Jumlah			

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Sejarah Pembentukan Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung terbentuk berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah Kabupaten Temanggung di lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

B. Geografi

1. Letak Wilayah

   Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di propinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Temanggung terletak diantara 7˚14' - 7˚32'35" Lintang Selatan dan 110˚23' - 110˚4630" Bujur Timur. Jarak terjauh dari Barat ke timur adalah 43.437 km, jarak terjauh dari utara ke selatan adalah 34.375 km.

2. Batas Wilayah

   Disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang, disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal, disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang.

3. Pembagian Wilayah

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan yang dibagi menjadi 288 desa dan 1496 dusun.

Dua puluh kecamatan tersebut adalah

1. Kecamatan Parakan
2. Kecamatan Bulu
3. Kecamatan Temanggung
4. Kecamatan Tembarak
5. Kecamatan Pringsurat
6. Kecamatan Kaloran
7. Kecamatan Kandangan
8. Kecamatan Kedu
9. Kecamatan Jumo
10. Kecamatan Ngadirejo
11. Kecamatan Candiroto
12. Kecamatan Tretep
13. Kecamatan Kranggan
14. Kecamatan Tiogo Mulyo
15. Kecamatan Selopampang
16. Kecamatan Bansari
17. Kecamatan Kledung
18. Kecamatan Gemawang
19. Kecamatan Wonoboyo

20. Kecamatan Bejen

4. Luas Wilayah

Wilayah kabupaten Temanggung memiliki luas 870,65 km yang dirinci menurut kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Desa, Dusun dan Luas Kecamatan
Di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas Km^2
1.	Parakan	16	79	22,23
2.	Bulu	19	89	43,04
3.	Temanggung	24	128	33,39
4.	Tembarak	13	64	26,84
5.	Pringsurat	14	113	57,28
6.	Kaloran	14	103	63,91
7.	Kandangan	16	105	78,36
8.	Kedu	14	106	34,96
9.	Jumo	13	68	29,32
10.	Ngadirejo	20	89	53,31
11.	Candiroto	14	76	59,94
12.	Tretep	11	30	33,65
13.	Kranggan	13	113	57,61
14.	Tlogo Mulyo	12	49	24,84
15.	Selopampang	12	42	17,29
16.	Bansari	13	43	22,53
17.	Kledung	13	33	32,21
18.	Gemawang	10	56	67,11
19.	Wonoboyo	13	60	43,98
20.	Bejen	14	50	68,54
	Jumlah	**288**	**1496**	**870,65**

C. Fasilitas Yang Terdapat di Kabupaten Temangung

1. Fasilitas Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Temanggung yang berupa gedung sekolah beserta alat kelengkapan proses belajar mengajar adalah sebagai berikut: TK sebanyak 316 unit, SD Negeri 450 unit, SD Swasta 10 unit dengan pengajar sejumlah 3.504 orang. Sedangkan untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) tercatat sebanyak 138 unit dengan pengajar 1.086 orang. Sarana pendidikan SLTP yaitu SMP dan Mts (Negeri dan Swasta) tercatat 93 unit sekolah, sedangkan untuk SMU/MA tercatat 22 unit dan SMK (Kejuruan) 9 unit sekolah.

Selain itu Kabupaten Temanggung juga mempunyai sarana pendidikan tinggi yaitu 1 Perguruan Tinggi dan 2 Akper.

2. Fasilitas Kesehatan

Kabupaten Temanggung memiliki 3 buah rumah sakit, 23 buah Puskesmas, 39 buah Puskesmas Pembantu, 3 buah Balai Pengobatan, 4 buah BKIA, 1395 buah Posyandu dan 10 buah Apotik.

3. Fasilitas Peribadatan

Sarana peribadatan di Kabupaten Temangung terdiri dari 4 buah Gereja Katholik, 36 buah Gereja Kristen Protestan, 1209 buah Masjid, dan 70 buah Vihara.

D. Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan jenis kelaminnya tahun 1999- 2002 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung
Dirinci menurut jenis kelamin Tahun 1999-2002

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1999	324012	330880	654892
2000	326551	333250	659801
2001	329404	335982	665386
2002	331283	337727	669010

Sumber data: Badan pusat Statistik Kabupaten Temanggung

2. Komposisi Penduduk

Ditinjau dari jenis kelaminnya, sebagian besar kecamatan di kabupaten Temangung mempunyai jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya, tabel dibawah ini menunjukan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.3
Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2002

No.	Kecamatan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Parakan	22.623	23.354	45.977
2.	Bulu	20.208	19.804	40.012
3.	Temanggung	34.501	36.339	70.840
4.	Tembarak	12.833	12.934	25.767

5.	Pringsurat	21.404	21.561	42.965
6.	Kaloran	19.920	20.657	40.577
7.	Kandangan	21.566	21.792	43.358
8.	Kedu	24.314	24.484	48.798
9.	Jumo	12.907	13.010	25.917
10.	Ngadirejo	23.808	24.256	48.064
11.	Candiroto	14.083	14.698	28.781
12.	Tretep	8.986	9.216	18.202
13.	Kranggan	19.277	20.031	39.308
14.	Tlogo Mulyo	9.648	9.855	19.503
15.	Selopampang	8.317	8.460	16.777
16.	Bansari	10.672	10.612	21.284
17.	Kledung	12.357	12.227	24.584
18.	Gemawang	13.989	14.207	28.196
19.	Wonoboyo	11.186	11.425	22.611
20.	Bejen	8.684	8.805	17.489
	Jumlah	331.283	337.727	669.010

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk juga menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2002

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan (Jiwa/km^2)
1.	Parakan	45.977	22,23	2069
2.	Bulu	40.012	43,04	929
3.	Temanggung	70.840	33,39	2122
4.	Tembarak	25.767	26,84	960
5	Pringsurat	42.965	57,28	750
6.	Kaloran	40.577	63,91	635
7.	Kandangan	43.358	78,36	553
8.	Kedu	48.798	34,96	1396
9.	Jumo	25.917	29,32	884
10.	Ngadirejo	48.064	53,31	902
11.	Candiroto	28.781	59,94	480
12.	Tretep	18.202	33,65	541
13.	Kranggan	39.308	57,61	682
14.	Tlogo Mulyo	19.503	24,84	785
15.	Selopampang	16.777	17,29	970
16.	Bansari	21.284	22,53	945
17.	Kledung	24.584	32,21	763
18.	Gemawang	28.196	67,11	420
19.	Wonoboyo	22.611	43,98	514
20.	Bejen	17.489	68,54	255
	Jumlah	669.010	870,65	768

4. Angkatan Kerja

Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu potensi pembangunan yang sangat menentukan keberhasilan proses pembangunan

itu sendiri. Permasalahan yang ditimbulkan dalam aspek ketenagakerjaan apabila ternyata SDM di usia produktif banyak yang menjadi pengganguran. Data terakhir mengenai jumlah tenaga kerja dan pengangguran dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
Data Tenaga Kerja dan Pengaguran tahun 2002

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bekerja	206.996	149.859	356.855
2.	Mencari Kerja	4.732	1.899	6.631

Tabel 4.6
Pencari Kerja Di Kabupaten Temanggung
yang mendaftar tahun 2002

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD	27	40	97
2.	SMP	288	239	467
3.	SMA	384	256	640
4.	STM	244	7	251
5.	SMEA	72	212	284
6.	SPG	-	-	-
7.	SMKK	-	2	2
8.	Setingkat SLTA	-	-	-
9.	DIII/Sarjana Muda	59	80	139
10.	S I / Sarjana	132	127	259
	Jumlah	**1.146**	**963**	**2.109**

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

E. Kekayaan Alam

1. Jenis tanah

Wilayah Kabupaten Temanggung mempunyai 5 jenis tanah yaitu latosal coklat seluas 26.563,47 Ha, latosal coklat kemerahan seluas 7.879,93 Ha, latosol coklat kekuningan seluas 29.209,08 Ha, andosol coklat seluas 2.149,55 Ha, dan regusol kelabu seluas 16.873,97 Ha.

2. Pemanfaatan tanah

Tabel 4.7
Pemanfaatan Tanah

No.	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1.	Sawah irigasi	19.647,48	22,57
2.	Sawah tadah hujan	1.005,81	1,16
3.	Bangunan/pekarangan	9.110,64	10,46
4.	Tegalan	29.099,13	33,42
5.	Kolam	28,51	0,03
6.	Hutan rakyat/negara	15.684,91	18,02
7.	Perkebunan	10.350,90	11,89
8.	Lain-lain	2.137,58	2,46
		87.065,00	100,00

F. Sumber Daya Alam

Kabupaten Temenggung kaya akan hasil pertanian sehingga penduduknya bermata pencarian petani. Pada sektor pertanian tanaman pangan terbesar adalah kopi, jahe, bawang putih, tembakau, jagung dan sektor peternakan meliputi ayam, kuda, sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, dan babi.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di kabupaten Temanggung untuk mengetahui proporsi, efektifitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tentunya data utama yang diperlukan adalah daftar realisasi Pendapatan Asli Daerah yang memuat data-data realisasi penerimaan setiap retribusi pada tahun anggaran tertentu.

Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sangat mempengaruhi penerimaan daerah. Data realisasi retribusi daerah dapat menunjukkan tingkat kemampuan daerah pada bidang keuangan.

Retribusi yang dipungut pemerintah daerah kabupaten Temanggung tahun anggaran 1999/2000 berjumlah 15 jenis retribusi, tahun anggaran 2000 berjumlah 13 retribusi, tahun anggaran 2001 berjumlah 16 jenis retribusi, tahun anggaran 2002 berjumlah 17 jenis retribusi dan tahun anggaran 2003 berjumlah 19 jenis retribusi. Penambahan jenis retribusi tiap tahun anggaran disebabkan karena adanya ekstensifikasi retribusi yang dilakukan dengan tujuan untuk menambah penerimaan daerah.

A. Analisis Proporsi Masing-Masing Retribusi

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah digunakan rumus :

$$\text{Proporsi retribusi} = \frac{\text{Besar Retribusi}}{\text{Total Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan :

Proporsi Retribusi : Prosentase jenis suatu retribusi terhadap keseluruhan retribusi daerah

Besar Retribusi : Besarnya suatu jenis retribusi (retribusi pasar, retribusi terminal, dan lain-lain)

Total Retribusi : Jumlah total retribusi daerah pada tahun anggaran tertentu

Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Proporsi Masing-masing Retribusi Terhadap Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 1999/2000

No	Jenis Retribusi	Penerimaan Retribusi	Proporsi Retribusi Terhadap Retribusi Daerah (%)
1.	Pelayanan Kesehatan	2.963.261.801	69,02
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.799.850	1,88
3.	Pelayanan Kependudukan dan Capil	165.016.000	3,84
4.	Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	10.783.750	0,25
5.	Parkir di Tepi Jalan Umum	135.134.700	3,15
6.	Pasar	563.950.525	13,14
7.	Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-
8.	Pemakaian Kekayaan Daerah	56.699.000	1,32
9.	Terminal	68.496.000	1,60
10.	Khusus Parkir	-	-
11.	Rumah Potong Hewan	30.232.350	0,70
12.	Tempat Rekreasi	62.001.180	1,44
13.	Penjualan Produksi Usaha Daerah	9.000.000	0,21
14.	Ijin Bangunan	122.946.880	2,86
15.	Ijin Gangguan	25.000.550	0,58
16.	Ijin Trayek	-	-
17.	Ijin Tebang Angkut	-	-
18.	Perijinan Bidang Perindag	-	-
19.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi	-	-
	Total Retribusi Daerah	**4.293.322.586**	**100**

Sumber: DIPENDA Kabupaten Temanggung

Tabel 5.2
Proporsi Masing-masing Retribusi Terhadap Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2000

No	Jenis Retribusi	Penerimaan Retribusi	Proporsi Retribusi Terhadap Retribusi Daerah (%)
1.	Pelayanan Kesehatan	2.313.678.449	65,06
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	79.084.900	2,22
3.	Pelayanan Kependudukan dan Capil	82.355.000	2,32
4.	Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	8.118.500	0,23
5.	Parkir di Tepi Jalan Umum	105.788.800	2,97
6.	Pasar	519.982.795	14,62
7.	Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-
8.	Pemakaian Kekayaan Daerah	57.296.000	1,61
9.	Terminal	55.672.300	1,57
10.	Khusus Parkir	-	-
11.	Rumah Potong Hewan	27.632.150	0,78
12.	Tempat Rekreasi	42.442.690	1,19
13.	Penjualan Produksi Usaha Daerah	7.504.000	0,21
14.	Ijin Bangunan	118.849.275	3,34
15.	Ijin Gangguan	137.658.715	3,87
16.	Ijin Trayek	-	-
17.	Ijin Tebang Angkut	-	-
18.	Perijinan Bidang Perindag	-	-
19.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi	-	-
	Total Retribusi Daerah	**3.556.063.574**	**100**

Sumber: DIPENDA Kabupaten Temanggung

Tabel 5.3
Proporsi Masing-masing Retribusi Terhadap Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2001

No	Jenis Retribusi	Penerimaan Retribusi	Proporsi Retribusi Terhadap Retribusi Daerah (%)
1.	Pelayanan Kesehatan	4.576.789.500	65,38
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	160.975.900	2,30
3.	Pelayanan Kependudukan dan Capil	258.855.500	3,70
4.	Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	7.827.000	0,11
5.	Parkir di Tepi Jalan Umum	64.744.900	0,92
6.	Pasar	861.953.550	12,31
7.	Pengujian Kendaraan Bermotor	187.145.700	2,67
8.	Pemakaian Kekayaan Daerah	72.618.000	1,04
9.	Terminal	172.885.600	2,47
10.	Khusus Parkir	66.265.200	0,95
11.	Rumah Potong Hewan	62.841.300	0,90
12.	Tempat Rekreasi	122.897.825	1,76
13.	Penjualan Produksi Usaha Daerah	10.995.000	0,16
14.	Ijin Bangunan	218.769.150	3,13
15.	Ijin Gangguan	148.322.786	2,12
16.	Ijin Trayek	6.425.000	0,09
17.	Ijin Tebang Angkut	-	-
18.	Perijinan Bidang Perindag	-	-
19.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi	-	-
	Total Retribusi Daerah	**7.000.311.911**	**100**

Sumber: DIPENDA Kabupaten Temanggung

Tabel 5.4
Proporsi Masing-masing Retribusi Terhadap Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2002

No	Jenis Retribusi	Penerimaan Retribusi	Proporsi Retribusi Terhadap Retribusi Daerah (%)
1.	Pelayanan Kesehatan	6.458.636.388	61,11
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	178.998.500	1,69
3.	Pelayanan Kependudukan dan Capil	319.368.500	3,02
4.	Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	5.358.000	0,05
5.	Parkir di Tepi Jalan Umum	177.254.500	1,68
6.	Pasar	1.106.887.550	10,47
7.	Pengujian Kendaraan Bermotor	451.017.900	4,27
8.	Pemakaian Kekayaan Daerah	363.364.500	3,44
9.	Terminal	205.409.200	1,94
10.	Khusus Parkir	86.877.000	0,82
11.	Rumah Potong Hewan	69.075.300	0,65
12.	Tempat Rekreasi	104.522.540	0,99
13.	Penjualan Produksi Usaha Daerah	14.205.000	0,13
14.	Ijin Bangunan	251.162.695	2,38
15.	Ijin Gangguan	528.745.138	5,00
16.	Ijin Trayek	40.619.000	0,38
17.	Ijin Tebang Angkut	207.723.003	1,97
18.	Perijinan Bidang Perindag	-	-
19.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi	-	-
	Total retribusi daerah	**10.569.224.714**	**100**

Sumber: DIPENDA Kabupaten Temanggung

Tabel 5.5
Proporsi Masing-masing Retribusi Terhadap Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2003

No	Jenis Retribusi	Penerimaan Retribusi	Proporsi Retribusi Terhadap Retribusi Daerah (%)
1.	Pelayanan Kesehatan	6.267.732.904	57,98
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	209.275.550	1,94
3.	Pelayanan Kependudukan dan Capil	444.887.000	4,12
4.	Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	5.180.000	0,05
5.	Parkir di Tepi Jalan Umum	227.774.100	2,11
6.	Pasar	1.519.118.150	14,05
7.	Pengujian Kendaraan Bermotor	450.257.500	4,17
8.	Pemakaian Kekayaan Daerah	109.961.600	1,02
9.	Terminal	253.776.200	2,35
10.	Khusus Parkir	101.566.800	0,94
11.	Rumah Potong Hewan	71.923.900	0,67
12.	Tempat Rekreasi	107.500.600	0,99
13.	Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000.000	0,14
14.	Ijin Bangunan	376.681.270	3,48
15.	Ijin Gangguan	251.044.199	2,32
16.	Ijin Trayek	30.423.500	0,28
17.	Ijin Tebang Angkut	322.494.361	2,98
18.	Perijinan Bidang Perindag	16.595.000	0,15
19.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi	29.050.000	0,27
	Total retribusi daerah	**10.810.242.634**	**100**

Sumber: DIPENDA Kabupaten Temanggung

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Proporsi retribusi pelayanan kesehatan terhadap retribusi daerah selama tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 memberikan proporsi paling besar dibandingkan retribusi-retribusi yang lain. Pada tahun anggaran 1999/2000 proporsi yang diberikan terhadap retribusi daerah sebesar 69,02%, pada tahun anggaran 2000 sebesar 65,06%, tahun anggaran 2001 sebesar 56,38%, tahun anggaran 2002 sebesar 61,11% dan pada tahun anggaran 2003 sebesar 57,98%.

Dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 proporsi retribusi ini terhadap retribusi daerah semakin menurun kecuali pada tahun anggaran 2001 proporsi retribusi ini naik dari 65,06% menjadi 65,38%, kenaikan sebesar 0,32% menunjukkan adanya kenaikan jumlah pasien atau pemakai layanan kesehatan yang meningkat pada tahun tersebut.

Proporsi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 yaitu sebesar 69,02%. Proporsi yang tinggi ini dikarenakan jumlah pasien rawat inap pada tahun tersebut cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun beikutnya, dimana jumlah penerimaan retribusi melebihi target yang diperkirakan. Sedangkan proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 2003, sebesar 57,98%. Hal ini disebabkan oleh kualitas kesehatan penduduk yang semakin meningkat sehingga jumlah pemakai layanan kesehatan semakin menurun. Proporsi retribusi pelayanan kesehatan terhadap retribusi daerah sangat besar karena memberikan proporsi yang paling besar terhadap keseluruhan retribusi daerah.

2. Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Proporsi retribusi ini meningkat dari tahun anggaran 1999/2000 dengan proporsi 1,88% menjadi 2,22% pada tahun anggaran 2000. Kemudian pada tahun anggaran 2001 mengalami peningkatan sebesar 0,08%, yaitu menjadi 2,30%. Namun pada tahun anggaran 2002 dan 2003 mengalami penurunan menjadi 1,69% dan 1,94%.

Dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 proporsi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 2,30% dan proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 1,69%. Proporsi yang diberikan retribusi ini terhadap retribusi daerah rendah, ini menunjukkan adanya hambatan dalam pemungutan retribusi Persampahan/Kebersihan.

3. Retribusi Kependudukan dan Capil

Setiap tahun anggaran penerimaan dari pelayanan kependudukan dan capil mengalami penurunan sampai pada tahun anggaran 2002. Sedangkan pada tahun anggaran 2003 meningkat cukup besar yaitu dari 3,02% menjadi 4,12%.. Proporsi ini mengindikasikan bahwa pada tahun anggaran 2003 pemerintah cukup berhasil dalam meningkatkan penerimaan dari retribusi ini.

Dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 Proporsi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2003 yaitu sebesar 4,12% karena adanya peningkatan pelayanan KTP di kecamatan. Proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 2000 yaitu sebesar 2,32%. Kondisi ini menunjukkan jumlah penduduk yang menetap di kabupaten Temanggung semakin meningkat.

Proporsi retribusi ini terhadap retribusi daerah dapat dikatakan potensial dari keseluruhan retribusi daerah dan cukup berpotensi sebagai penerimaan daerah. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan proporsinya pada tahun anggaran 2003 yang besar. Selain itu dapat diprediksikan bahwa penerimaan dari retribusi ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

4. Retribusi Pemakaman dan Penguburan Mayat

Dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 proporsi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 yaitu sebesar 0,25% sedangkan proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 2002 dan tahun anggaran 2003 yaitu sebesar 0,05%. Proporsi tertinggi dan terendah masih dikatakan sangat rendah karena berada di bawah 1%.

Proporsi retribusi ini terhadap retribusi daerah sangat rendah sehingga relatif tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan retribusi daerah. Proporsi yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa jenis retribusi ini kurang berpotensi bagi retribusi daerah.

5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Proporsi retribusi ini pada tahun anggaran 1999/2000 cukup besar terhadap keseluruhan retribusi daerah yaitu sebesar 3,15% dari 13 jenis retribusi yang dipungut. Dimana proporsi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 dan proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 0,92%. Proporsi terendah terjadi pada saat adanya ekstensifikasi retribusi yaitu dibukanya tempat khusus parkir. Secara keseluruhan sejak tahun anggaran 2001 proporsi retribusi ini semakin meningkat. Kondisi ini menunjukkan kendaraan bermotor di

kabupaten Temanggung semakin bertambah, dengan demikian jenis retribusi ini semakin berpotensi bagi penerimaan daerah.

6. Retribusi Pasar

Selama tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 selain retribusi pelayanan kesehatan yang memberikan proporsi terbesar terhadap retribusi daerah adalah retribusi pasar.

Proporsi tertinggi yang diberikan retribusi pasar terhadap retribusi daerah terjadi pada tahun anggaran 2000 yaitu sebesar 14,62% dan proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 10,47%. Dilihat dari proporsi terendah dan proporsi tertinggi, retribusi ini mempunyai proporsi yang sangat tinggi terhadap retribusi daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pasar dalam peningkatan penerimaan retribusi daerah cukup tinggi. Proporsi retribusi ini yang sangat besar dari keseluruhan retribusi daerah akan sangat mempengaruhi kenaikan atau penurunan penerimaan retribusi daerah.

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Jenis retribusi ini baru diberlakukan di kabupaten Temanggung sejak tahun anggaran 2001. Pada tahun ini proporsi yang diberikan terhadap retribusi daerah sebesar 2,67% dan meningkat 1,50% pada tahun berikutnya. ini menunjukkan bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor cukup berpotensi dalam retribusi daerah.Dari tahun anggaran 2001 sampai tahun anggaran 2003 proporsi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 4,27% dan proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 2,67%.

8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Secara keseluruhan proporsi retribusi ini terhadap retribusi daerah relatif stabil dan memiliki proporsi yang kecil terhadap retribusi daerah, kecuali pada tahun anggaran 2002 proporsinya mengalami peningkatan cukup besar, yaitu dari 1,04% pada tahun anggaran 2001 menjadi 3,44%.

Dari tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2003 proporsi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 3,44% dan proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 2003 yaitu sebesar 1,02%.

9. Retribusi Terminal

Proporsi Retribusi Terminal terhadap retribusi daerah yang relatif rendah menunjukkan bahwa aktifitas penggunaan terminal oleh kendaraan umum tidak cukup tinggi. Secara keseluruhan dalam 5 tahun anggaran proporsi yang dicapai berada di bawah 3%. Kenaikan dan penurunan proporsi yang terjadi tidak begitu berarti. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan-hambatan yang harus diatasi pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan dari retribusi ini. Dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 proporsi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 2,47% dan proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 2000 yaitu sebesar 1,57%.

10. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi ini mulai diberlakukan sejak tahun anggaran 2001. Proporsi yang diberikan retribusi ini terhadap retribusi daerah pada tahun anggaran 2001 sebesar 0,95%. Pada tahun anggaran 2002 sebesar 0,82% dan pada tahun anggaran 2003 sebesar 0,94%. Dari tahun anggaran 2001 sampai tahun anggaran 2003 proporsi

tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 0,95% dan proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 0,82%. Jika dilihat dari proporsi tertinggi dan terendah maka proporsi penerimaan terhadap retribusi daerah masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada hambatan-hambatan yang harus ditangani pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaannya.

11. Retribusi Rumah Potong Hewan

Proporsi yang diberikan retribusi ini terhadap retribusi daerah pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar 0,70%, pada tahun anggaran 2000 sebesar 0,78%, pada tahun anggaran 2001 sebesar 0,90%, pada tahun anggaran 2002 sebesar 0,65% dan pada tahun anggaran 2003 sebesar 0,67%.

Dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 proporsi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 0,90% dan proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 0,65%. Proporsi dari jenis retribusi ini berkaitan dengan intensitas penggunaan Rumah Potong Hewan. Proporsi yang rendah menunjukkan adanya hambatan-hambatan dalam pemungutan retribusi ini yang belum dapat diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

12. Retribusi Tempat Rekreasi

Proporsi yang diberikan retribusi ini terhadap retribusi daerah pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar 1,44%, pada tahun anggaran 2000 sebesar 1,19%, pada tahun anggaran 2001 sebesar 1,76%, pada tahun anggaran 2002 dan 2003 sebesar 0,99%.

Dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 proporsi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 1,76% dan proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 2002 dan tahun anggaran 2003 yaitu sebesar 0,99% karena banyaknya fasilitas yang sudah rusak. Naik dan turunnya proporsi penerimaan retribusi ini terhadap retribusi daerah sebanding dengan jumlah pengunjung tempat-tempat rekreasi. Penerimaan dari retribusi ini juga berkaitan langsung dengan penerimaan dari Retribusi Tempat Khusus Parkir yang berada di tempat rekreasi. Dengan kata lain bahwa semakin tinggi penerimaan dari retribusi ini maka akan semakin tinggi juga penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Proporsi yang diberikan retribusi ini terhadap retribusi daerah pada tahun anggaran 1999/2000 dan pada tahun anggaran 2000 adalah sama yaitu sebesar 0,21%, pada tahun anggaran 2001 sebesar 0,16%, pada tahun anggaran 2002 sebesar 0,13% dan pada tahun anggaran 2003 sebesar 0,14%.

Dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 proporsi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 dan tahun anggaran 2000 yaitu sebesar 0,21% dan proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 0,13%. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa proporsi dari retribusi ini sangat rendah dan semakin menurun. Kondisi ini menggambarkan usaha-usaha daerah yang semakin melemah.

14. Retribusi Ijin Bangunan

Proporsi yang diberikan retribusi ini terhadap retribusi daerah pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar 2,86%, pada tahun anggaran 2000 sebesar 3,34%,

pada tahun anggaran 2001 sebesar 3,13%, pada tahun anggaran 2002 sebesar 2,38% dan pada tahun anggaran 2003 sebesar 3,48%.

Dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 proporsi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2003 yaitu sebesar 3,48% karena adanya peningkatan area pelayanan sehingga menambah jumlah pemohon IMB. Proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 2,38%. Proporsi tertinggi yang terjadi pada tahun anggaran terakhir dalam 5 tahun menunjukkan adanya kenaikan proporsi. Kenaikan proporsi ini mengindikasikan bahwa jumlah bangunan yang didirikan semakin bertambah. Pertambahan ini juga sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk yang menetap di kabupaten Temanggung.

15. Retribusi Ijin Gangguan

Proporsi retribusi ini selama tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 cukup tinggi, kecuali pada tahun anggaran 1999/2000 yang hanya mencapai 0,58%. Namun pada tahun anggaran 2000 dan 2001 naik menjadi 3,87% dan 2,12%. Sedangkan proporsi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 5%, disebabkan adanya pendirian perusahaan besar yaitu kayu dan peternakan. Proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 yaitu sebesar 0,58%.

16. Retribusi Ijin Trayek

Retribusi Ijin Trayek mulai diberlakukan sejak tahun anggaran 2001 dengan proporsi 0,09% terhadap retribusi daerah. Dari tahun anggaran 2001 sampai tahun anggaran 2003 proporsi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 0,38% dan proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu

sebesar 0,09%. Kondisi proporsi retribusi ini terhadap retribusi daerah yang masih rendah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung mempunyai hambatan yang besar pada pemungutan Retribusi Ijin Trayek.

17. Retribusi Ijin Tebang Angkut

Retribusi Ijin Tebang Angkut mulai diberlakukan sejak tahun anggaran 2002. Dari tahun anggaran 2002 sampai tahun anggaran 2003 proporsi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2003 yaitu sebesar 2,98% karena adanya peningkatan produktifitas pengolahan kayu dari pabrik sedangkan proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 1,97%.

18. Retribusi Perijinan Bidang Perindag

Retribusi Perijinan Bidang Perindag mulai diberlakukan sejak tahun anggaran 2003. Proporsinya terhadap retribusi daerah sebesar 0,15%. Namun proporsi yang dberikan masih cukup rendah, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung masih harus mengembangkan retribusi ini sehingga pada tahun-tahun berikutnya kontribusi ini dapat memberikan proporsi yang tinggi terhadap retribusi daerah dan dapat meningkatkan penerimaan daerah.

19. Retribusi Usaha Jasa Konstruksi

Retribusi Usaha Jasa Konstruksi mulai diberlakukan sejak tahun anggaran 2003. Proporsi yang diberikan terhadap retribusi daerah sebesar 0,27%. Proporsi yang masih rendah menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten temanggung harus lebih meningkatkan dan menggali potensi dari retribusi ini sehingga dapat meningkatkan penerimaannya.

B. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran (realisasi) dengan sasaran yang harus dicapai (target). Untuk mengetahui efektifitas penerimaan retribusi daerah digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \text{ X } 100\%$$

Untuk menentukan efektif tidaknya retribusi daerah digunakan asumsi bahwa:

1. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi retribusi daerah) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target retribusi daerah) maka dikatakan penerimaan retribusi daerah semakin efektif.
2. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi retribusi daerah) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target retribusi daerah) maka dikatakan penerimaan retribusi daerah semakin kurang efektif.

Secara jelas, efektifitas retribusi daerah ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.6
Efektivitas Retribusi Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 1999/2000 sampai Tahun Anggaran 2003

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Daerah	Target	Tingkat Efektifitas (%)
1999/2000	4.293.322.586	3.883.750.000	110,55
2000	3.556.063.574	3.178.077.000	111,89
2001	7.000.311.911	6.876.663.000	101,80
2002	10.569.224.714	10.975.153.000	96,30

2003	10.810.242.634	12.567.450.000	86,02
		Rata-Rata	**101,31**

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa:

a. Tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah di kabupaten Temanggung tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 secara keseluruhan dapat dikatakan efektif, hal ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat efektivitas tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 yang mencapai 101,31%. Walaupun pada tahun anggaran 2002 sampai tahun anggaran 2003 mengalami penurunan dibawah 100% yang berarti retribusi tidak efektif. Sedangkan pada tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2001 tingkat efektivitas melebihi 100% sehingga dapat dikatakan penerimaan retribusi sudah efektif.

b. Pada tahun anggaran 1999/2000 tingkat efektivitas melebihi 100% yaitu 110,55%, berarti bahwa pada tahun anggaran tersebut penerimaan retribusi daerah sudah efektif. Realisasi penerimaan retribusi melebihi target yang direncanakan. Dari yang ditargetkan penerimaan retribusi mempunyai kelebihan sebesar Rp. 409.572.586. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya di bidang keuangan dengan baik.

c. Pada tahun anggaran 2000 tingkat efektifitas mengalami kenaikan menjadi 111,89%. Realisasi yang dilakukan sebesar Rp. 3.556.063.574 lebih besar dari yang ditargetkan pemerintah yaitu sebesar Rp. 3.178.077.000. Dengan demikian pemerintah mempunyai simpanan sebesar Rp. 377.986.574.

Keadaan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam melakukan pemungutan retribusi.

d. Pada tahun anggaran 2001 tingkat efektivitas menurun menjadi 101,80%. Walaupun terjadi penunggakan pada target dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 6.876.668.000 dan Rp. 7.000.311.911. Dengan tingkat efektivitas seperti ini masih menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan melalui retribusi. Kelebihan penerimaan yang diperoleh pada tahun anggaran 2001 ini adalah sebesar Rp. 123.648.911.

e. Pada tahun anggaran 2002 tingkat efektivitas semakin menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu menjasi 96,30%. Realisasi retribusi sebesar Rp. 10.569.224.714 lebih kecil dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 10.975.153.000. Ada tunggakan sebesar Rp. 405.928.290. Jika tunggakan tersebut dibandingkan dengan kelebihan penerimaan sejak tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2001 sebesar Rp. 911.208.071 maka tunggakan tersebut masih dapat ditutupi. Jika demikian maka kelebihan penerimaan yang masih dapat disimpan adalah sebesar Rp. 505.279.781.

f. Pada tahun anggaran 2003 tingkat efektivitas menjadi 86,02%. Lebih kecil dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Ada tunggakan sebesar Rp. 1.757.207.370 dari yang ditargetkan. Penurunan tingkat efektifitas pada tahun anggaran ini dikarenakan adalanya penurunan penerimaan dari beberapa jenis retribusi. Tetapi dengan simpanan yang masih dimiliki

pemerintah sampai pada tahun anggaran 2002, masih mencukupi untuk menutupi tunggakan tersebut.

Untuk mengetahui kecenderungan efektifitas penerimaan retribusi daerah selama tahun anggaran 1999 sampai tahun anggaran 2003 dapat diketahui melalui trend efektifitas dengan menggunakan analisis *least square* dengan formula:

$Y' = a + bx$

Dimana:

Y' = trend efektifitas retribusi daerah

a = konstanta yang akan menunjukkan besarnya nilai x = 0

b = variabilitas permintaan x yaitu besarnya perubahan nilai Y dari setiap perubahan nilai x.

Tabel 5.7 di bawah ini menunjukkan trend efektifitas retribusi daerah.

Tabel 5.7
Trend Efektivitas Retribusi Daerah
Kabupaten Temanggung

Tahun Anggaran	Tingkat Efektivitas (%)	X	XY	X^2	Y' (%)
1999/2000	110,55	-2	-221,10	4	114,24
2000	111,89	-1	-111,89	1	107,77
2001	101,80	0	0,00	0	101,31
2002	96,30	1	96,30	1	94,84
2003	86,02	2	172,04	4	88,38
Jumlah	**506,56**	**0**	**-64,65**	**10**	

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{N} = \frac{506,56}{5} = 101,31 \text{ dan } b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-64,65}{10} = -6,46$$

Dari tabel 5.9 dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi di kabupaten Temanggung sudah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai sudah mencapai 100%, yaitu sebesar 101,31%. Tingkat efektivitasnya menurun dari tahun ke tahun dengan rata-rata perubahan sebesar 6,47%.

C. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{PAD}} \text{ X } 100\%$$

Tabel di bawah ini menjelaskan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD.

Tabel 5.8
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD
Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 1999/2000 sampai Tahun Anggaran 2003

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi (%)
1999/2000	4.293.322.586	6.180.422.475	69,47
2000	3.556.063.574	5.179.897.064	68,65
2001	7.000.311.911	11.194.675.460	62,53
2002	10.569.224.714	18.021.899.978	58,65
2003	10.810.242.634	18.580.063.661	58,18
Rata-Rata			**63,50**

Dari tabel 5.8 dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 berkisar antara 58,18% - 69,47%. Pada tahun anggaran 1999/2000 retribusi daerah hanya memberikan kontribusi sebesar 69,47% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Seiring dengan adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2000, kontribusi juga mengalami penurunan sebesar 0,82% yaitu dari 69,47% menjadi 68,65%.

Meskipun pada tahun anggaran 2001 retribusi mengalami peningkatan dalam realisasinya namun kontribusi yang diberikan tetap mengalami penurunan atau lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kenaikan realisasi retribusi diikuti pula dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah. Dari kontribusi yang diberikan pada tahun anggaran 2001 sebesar 62,53%, pada tahun anggaran 2002 turun menjadi 58,65% atau berkurang sebesar 3,88% dari tahun sebelumnya. Keadaan yang serupa terjadi pula pada tahun anggaran 2003 dimana kontribusi retribusi daerah turun menjadi 58,18% atau berkurang sebesar 0,47%.

Rata-rata kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 adalah sebesar 63,50%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 dengan kontribusi 69,47% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun anggaran 2003 dengan kontribusi 58,18%. Dengan demikian retribusi daerah yang dipungut

pemerintah daerah kabupaten Temanggung mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Selama lima tahun anggaran perkembangan proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah terkadang mengalami kenaikan terkadang mengalami penurunan.
2. Penerimaan retribusi daerah di kabupaten Temanggung selama tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 berkisar antara 86,02% sampai 111,89% dengan rata-rata efektivitas mencapai 101,31%. Dengan demikian penerimaan retribusi daerah sudah dapat dikatakan efektif karena rata-rata efektivitasnya telah melebihi 100%.
3. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 berkisar antara 58,18% sampai 69,47% dengan rata-rata mencapai 63,50%. Kontribusi retribusi yang mencapai 63,50% dapat dikatakan sangat besar karena dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah berarti kontribusi penerimaan daerah selain dari retribusi daerah hanya mencapai 37,50%, dimana prosentase ini merupakan gabungan dari beberapa penerimaan daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan jumlah jenis retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.
2. Penelitian ini hanya dapat diterapkan di kabupaten Temanggung tetapi belum tentu dapat diterapkan di daerah lain karena merupakan studi kasus.
3. Dalam penelitian ini terdapat data anggaran yang hanya terdiri 9 bulan untuk tahun anggaran 1999/2000 dan telah diasumsikan menjadi 12 bulan.

C. Saran

Dari kesimpulan dan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pemerintah daerah dalam rangka memaksimalkan penerimaan melalui retribusi daerah. Saran-saran yang dapat diberikan adalah :

1. Proporsi dari retribusi-retribusi yang cenderung mengalami penurunan hendaknya lebih digali potensinya sehingga dapat memberikan proporsi yang lebih besar terhadap retribusi daerah.
2. Efektivitas penerimaan retribusi daerah yang cukup besar hendaknya tetap dipertahankan atau bahkan lebih ditingkatkan dengan cara memaksimalkan pemungutan pada jenis-jenis retribusi yang masih rendah penerimaannya.
3. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang sudah sangat besar hendaknya terus dipertahankan sehingga penerimaan daerah dapat lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Anthony, Dearden dan Bedford. (1993). *Sistem Pengendalian Manajemen 1.* Edisi Keenam. (Agus Maulana, Penerjemah). Jakarta : Binarupa Aksara.

Bais, Yasinta Dolvina. (2003). *Peran Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah.* Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Budiyuwono, Nugroho. (1995). *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Devas, Nick. (1987). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.* Jakarta: UI–Press.

Kaho, Josef Riwu. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo.

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Statistik Kabupaten Temanggung. (2003). *Temanggung Dalam Angka.* Temanggung: BPS.

Munawir, Slamet. (1992). *Perpajakan.* Yogyakarta: Liberty.

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. (2002). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Temanggung: BAPPEDA.

Republik Indonesia. (1974). *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

_____. (2000). *Perubahan Atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000.* Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

_____. (1999). *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.* Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

_____. (1999). *UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.* Jakarta : CV. Tamita Utama.

Samudra, Azhari. (1995). *Perpajakan di Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suparmoko. (1984). *Keuangan Negara.* Yogyakarta: BPFE.

_____. (1992). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek.* Yogyakarta : BPFE.

Widjaja, H.A.W. (2001). *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wua, Veronika Stefania. (2001). *Peran Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah.* Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

A. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

1. Bagaimana sejarah pembentukan kabupaten Temanggung ?
2. Fasilitas apa saja yang terdapat di kabupaten Temanggung ?
3. Geografi
    a. Dimana letak kabupaten temanggun ?
    b. Bagaimana batas wilayahnya ?
    c. Bagaimana pembagian wilayahnya ?
    d. Berapa luas wilayahnya ?
4. Penduduk
    a. Berapa jumlah penduduk pada tahun 1999/2000 sampai 2003 ?
    b. Bagaimana komposisi penduduknya ?
    c. Berapa kepadatan penduduknya ?
    d. Berapa angkatan kerja/pencari kerja tahun 1999/2000 sampai 2003?
5. Kekayaan alam
    a. Bagaimana struktur dan jenis tanah yang ada ?
    b. Bagaimana pemanfaatan tanah yang ada ?
    c. Apa saja jenis flora dan faunanya ?
6. Ekonomi
    a. Bagaimana sektor pertaniannya ?
    b. Industri apa saja yang ada ?

c. Bagaimana sarana perhubungan yang ada ?

d. Bagaimana tempat pariwisatanya ?

e. Perdagangan apa saja yang dilakukan ?

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Ada berapa sektor Pendapatan Asli Daerah yang ada di kabupaten Temanggung ?
2. Apa dasar hukum yang melandasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah ?
3. Berapa anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan untuk masing-masing tahun dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 ?
4. Berapakan realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk masing-masing tahun mulai dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 ?
5. Antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan apakah mengalami peningkatan atau penurunan ?
6. Hal-hal apa saja yang menjadi penyebab kenaikan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah tersebut ?
7. Upaya apa yang diperlukan pemerintah daerah kabupetan Temanggung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?

C. Retribusi Daerah

1. Ada berapa sektor retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten Temanggung ?

2. Apa dasar hukum yang melandasi pemungutan tersebut ?
3. Berapa anggaran retribusi daerah yang telah ditetapkan untuk anggaran 1999/2000 sampai 2003 ?
4. Bagaimana realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun anggaran 1999/2000 sampai 2003 ?
5. Apa saja yang menyebabkan kenaikan dan penurunan penerimaan retribusi daerah tersebut?
6. Seberapa besar sumbangan masing-masing retribusi terhadap penerimaan retribusi daerah ?
7. Seberapa besar sumbangan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
8. Apakah penerimaan retribusi daerah sudah efektif ?

DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI
DAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 1999/2000

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN RP	REALISASI RP	%	TARGET TH 2000 RP
1	2	3	4	5	6
.2.	BAG.PENDAPATAN ASLI DAERAH				
.2.1	Pos Pajak Daerah				

.2.1-004	Pajak Hotel & Restoran	32.500.000	40.673.566	125,15	32.000.000
005	Pajak Hiburan	9.000.000	16.852.084	187,25	9.000.000
006	Pajak R e k l a m e	34.000.000	37.290.626	109,68	27.000.000
007	Pajak Penerangan Jalan	1.014.500.000	1.259.733.453	124,17	875.000.000
008	Pajak Galian Gol. C	5.000.000	5.494.381	109,89	2.700.000
009	Pajak Pemanfaatan ABT & APT	95.000.000	103.935.715	109,41	71.500.000
	Jumlah Pos Pajak Daerah	1.190.000.000	1.463.979.825	123,02	1.017.700.000
.2.2	POS RETRIBUSI DAERAH				

.2.2-001	Retri.Pelayanan Kesehatan				
a	Puskesmas	260.000.000	292.171.120	112,37	210.000.000
b	Rumah Sakit Umum (RSU)	2.400.000.000	2.628.545.681	109,52	2.000.000.000
c	Calon Mempelai	30.000.000	42.545.000	141,82	25.000.000
002	Retri.Pelayanan Persampahan	80.000.000	80.799.850	101,00	85.000.000
003	Retri.Penggan.Cetak KTP	165.000.000	165.016.000	100,01	75.000.000
004	Retri.Pelayanan Pemakaman	5.000.000	10.783.750	215,68	5.000.000
005	Retri.Park.ditepi Jl.Umum	126.000.000	135.134.700	107,24	101.000.000
006	Retribusi Pasar	490.000.000	563.950.525	115,09	385.000.000
012	Retri.Pemakain Kekay.Daerah :				
a	Penerr.Sewa Rm.Ngesti Roso	5.250.000	5.250.000	100,00	4.500.000
b	Radio Temanggung	12.000.000	12.029.000	100,24	10.000.000
c	Penerimaan DPU (mesin gilas)	15.000.000	39.420.000	262,80	15.000.000
014	Retribusi Terminal	70.000.000	68.496.000	97,85	52.500.000
019	Retri.Rumah Pot.Hewan	20.000.000	20.061.450	100,31	15.071.000
a	Penerimaan Dinas Peternakan	10.000.000	10.170.900	101,71	7.506.000
021	Retri.Temp.Rekreasi & Gor				
a	Tempat rekreasi	35.000.000	39.428.130	112,65	20.000.000
b	Gedung Olah Raga	21.500.000	22.573.050	104,99	15.000.000
024	Retri.Penju.Produk.Usaha Daer.	9.000.000	9.000.000	100,00	7.500.000
025	Retri.Ijin Perunt.Pengg.Tanah	0	0	0,00	0
026	Retribusi I.M.B.	115.000.000	122.946.880	106,91	85.000.000
028	Retribusi Ijin Gangguan	15.000.000	25.000.550	166,67	60.000.000
	Jumlah Pos Retribusi Daerah	3.883.750.000	4.293.322.586	110,55	3.178.077.000
.2.3.	POS BAGIAN LABA BUMD				

.2.3-001	Bank Pembangunan Daerah	85.000.000	0	0,00	63.750.000
002	Perusah.Daerah Air Minum	120.000.000	122.232.500	101,86	150.000.000
003	Perusah.Daerah Bank Pasar	50.000.000	56.846.200	113,69	60.000.000
004	Perusda Apotik Waringin Mulyo	12.000.000	15.033.330	125,28	14.000.000
005	Badan Kredit Kecamatan	17.500.000	22.475.350	128,44	20.000.000
	Juml Pos Bagian Laba BUMD.	284.500.000	216.589.380	76,13	307.750.000

1	2	3	4	5	6
2.4	POS LAIN-LAIN PENDAPATAN				
2.4-001	Hasil Penju.Milik Daerah	0	0	0,00	0
002	Jasa Giro	70.000.000	133.378.263	190,54	60.000.000
003	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0,00	0
030	Penerimaan Lain-lain	45.000.000	73.152.421	162,56	157.500.000
	Jumlah Lain-lain Pendapatan	115.000.000	206.530.684	179,59	217.500.000
	JUMLAH POS P A D S	5.473.250.000	6.180.422.475	112,92	4.721.027.000
.3.	BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK				
.3.1	Pos Bagi Hasil Pajak				
.3.1-001	Pajak Bumi & Bangunan	2.849.275.000	4.037.777.748	141,71	2.809.400.000
002	Bea Perol.Hak Atas Tnh&Bang	70.000.000	131.150.179	187,36	52.800.000
003	Pj.Bahan Bakar Kend.Bermotor	287.000.000	1.770.203.075	616,80	1.074.560.000
004	Bag.Has.Pj.dr.Tk.I (PKB-BBNKB)	0	0	0,00	550.000.000
	Jumlah Pos Bagi Hasil Pajak	3.206.275.000	5.939.131.002	185,23	4.486.760.000
.3.2	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak				
.3.2-001	Iuran Hasil Hutan	10.000.000	15.410.830	154,11	7.500.000
003	Pener.Hak Atas Tanah Negara	12.000.000	23.485.932	195,72	2.500.000
006	Bagi Hasil dari Tingkat I	0	0	0,00	U.P.
	Jumlah Pos Bag Hasil Bukan Pajak	22.000.000	38.896.762	176,80	10.000.000
	Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	3.228.275.000	5.978.027.764	185,18	4.496.760.000
	JUMLAH PADS DAN BAGI HASIL	8.701.525.000	12.158.450.239	139,73	9.217.787.000

Temanggung, Oktober 2000

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs.OERIP SOEKARJO

P e m b i n a
NIP. 500 041 997

-rs6-

DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI
DAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN : 2000

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN RP	REALISASI RP	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.2.	BAG.PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.2.1	POS PAJAK DAERAH				

1.2.1-004	Pajak Hotel & Restoran	32.500.000	37.724.516	116,08	
005	Pajak Hiburan	9.000.000	16.465.000	182,94	
006	Pajak R e k l a m e	27.000.000	43.402.526	160,75	
007	Pajak Penerangan Jalan Umum	875.000.000	681.780.585	77,92	
008	Pajak Galian Gol. C	2.700.000	10.017.223	371,01	
009	Pajak Pemanfaatan ABT & APT	71.500.000	74.857.924	104,70	
	JUMLAH POS PAJAK DAERAH	1.017.700.000	864.247.774	84,92	
1.2.2	POS RETRIBUSI DAERAH				

1.2.2-001	Retribusi Pelayanan Kesehatan:				
a	Puskesmas	210.000.000	226.659.405	107,93	
b	Rumah Sakit Umum (RSU)	2.000.000.000	2.059.329.044	102,97	
c	Calon Penganten	25.000.000	27.690.000	110,76	
002	Retri.Pelayanan Persampahan	85.000.000	79.084.900	93,04	
003	Retri.Penggan.Cetak KTP & Capil	75.000.000	82.355.000	109,81	
004	Retri.Pelayanan Pemakaman	5.000.000	8.119.500	162,37	
005	Retri.Park.ditepi Jl.Umum	101.000.000	105.788.800	104,74	
006	Retribusi Pasar	385.000.000	519.982.795	135,06	
012	Retri.Pemakain Kekay.Daerah :				
a	Pener.Sewa Rm.Ngestl Roso	4.500.000	4.500.000	100,00	
b	Radio Temanggung	10.000.000	10.266.000	102,66	
c	Penerimaan DPU (mesin gilas)	15.000.000	42.530.000	283,53	
014	Retribusi Terminal	52.500.000	55.672.300	106,04	
019	Retri.Rumah Pot.Hewan:				
a	Rumah Potong Hewan	15.071.000	20.126.000	133,54	
b	Retri.Kesehatan Ternak	7.506.000	7.506.150	100,00	
021	Retri.Temp.Rekreasi & Gor:				
a	Tempat rekreasi	20.000.000	25.877.690	129,39	
b	Gedung Olah Raga	15.000.000	16.565.000	110,43	
024	Retri.Penju.Produk.Usaha Daerah	7.500.000	7.504.000	100,05	
026	Retribusi I M B	85.000.000	118.849.275	139,82	
028	Retribusi Ijin Gangguan	60.000.000	137.658.715	229,43	
	JUMLAH POS RETRIBUSI DAERAH	3.178.077.000	3.556.063.574	111,89	

1.2.3. POS BAGIAN LABA .....

1	2	3	4	5	6
1.2.3.	POS BAGIAN LABA B U M D:				
1.2.3-001	Bank Pembangunan Daerah	63.750.000	0	0,00	
002	Perusah.Daerah Air Minum	150.000.000	150.000.000	100,00	
003	Perusahaan Daerah Bank Pasar	60.000.000	145.000.000	241,67	
004	Perusda Apotik Waringin Mulyo	14.000.000	14.000.000	100,00	
005	Badan Kredit Kecamatan	20.000.000	20.728.000	103,64	
	Jumlah Pos Bagian Laba BUMD	307.750.000	329.728.000	107,14	
1.2.4	POS LAIN-LAIN PENDAPATAN :				
1.2.4-001	Hasil Penjualan Milik Daerah	0	0	0,00	
002	Jasa Giro	60.000.000	99.999.765	166,67	
003	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0,00	
030	Penerimaan Lain-lain	157.500.000	329.857.951	209,43	
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN:	217.500.000	429.857.716	197,63	
	JUMLAH POS P A D S :	4.721.027.000	5.179.897.064	109,71	
1.3.	BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK :				
1.3.1	POS BAGI HASIL PAJAK				
1.3.1-001	Pajak Bumi & Bangunan	2.809.400.000	4.507.288.712	160,44	
002	Bea Perol.Hak Atas Tnh&Bang	52.800.000	190.010.574	359,87	
003	Pajak Bahan Bakar Kend.Bermotor	1.074.560.000	1.897.407.871	176,58	
004	Bag.Hasil.PJ.dr.Tk.I(PKB-BBNKB)	510.000.000	510.000.000	100,00	
	JUMLAH POS BAGI HASIL PAJAK	4.446.760.000	7.104.707.157	159,77	
1.3.2	POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK :				
1.3.2-001	Iuran Hasil Hutan	7.500.000	17.636.716	235,16	
003	Penerimaan Hak Atas Tanah Neg.	2.500.000	29.929.090	1197,16	
006	Bagi Hasil dari Propinsi	0	0	0,00	
	JUMLAH POS BAG.HASIL BUKAN PAJAK	10.000.000	47.565.806	475,66	
	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK:	4.456.760.000	7.152.272.963	160,48	
	JUMLAH PADS DAN BAGI HASIL	9.177.787.000	12.332.170.027	134,37	

Temanggung,

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs.OERIP SOEKARJO

P e m b i n a
NIP. 500 041 997

DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
========rs2001=========

DAFTAR REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI
DAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2001

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN RP	REALISASI RP	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.2.	BAG.PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.2.1	POS PAJAK DAERAH				

1.2.1-004	Pajak Hotel & Restoran	55.000.000	63.716.789	115,85	
005	Pajak Hiburan	16.000.000	19.155.813	119,72	
006	Pajak R e k l a m e	50.000.000	70.301.525	140,60	
007	Pajak Penerangan Jalan Umum	1.850.000.000	2.209.746.449	119,45	
008	Pajak Galian Gol. C	5.000.000	6.351.631	127,03	
009	Pajak Pemanfaatan ABT & APT	110.000.000	118.290.478	107,54	
	Jumlah Pos Pajak Daerah	2.086.000.000	2.487.562.685	119,25	
1.2.2	POS RETRIBUSI DAERAH				

1.2.2-001	Retri.Pelayanan Kesehatan				
a	Puskesmas	330.000.000	311.948.120	94,53	
b	Rumah Sakit Umum (RSU)	4.531.563.000	4.229.498.380	93,33	
c	Calon Penganten	47.500.000	35.343.000	74,41	
002	Retri.Pelayanan Persampahan	140.000.000	160.975.900	114,98	
003	Retri.Penggan.Cetak KTP & Capil				
a	Retri.Penggan.Cetak KTP	140.000.000	141.145.000	100,82	
b	Retri.Akte Catatan Sipil	120.000.000	117.710.500	98,09	
004	Retri.Pelayanan Pemakaman	10.000.000	7.827.000	78,27	
005	Retri.Park.ditepi Jl.Umum	85.000.000	64.744.900	76,17	
006	Retribusi Pasar	660.000.000	861.953.550	130,60	
008	Ret.Pengujian Kend.Bermotor	125.000.000	187.145.700	149,72	
012	Retri.Pemakain Kekay.Daerah :				
a	Pener.Sewa Rm.Ngesti Roso	6.600.000	6.600.000	100,00	
b	Radio Temanggung	16.000.000	16.208.000	101,30	
c	Penerimaan DPU (mesin gilas)	25.000.000	49.810.000	199,24	
014	Retribusi Terminal	140.000.000	172.885.600	123,49	
015	Retribusi Tempat Khusus Parkir	75.000.000	66.265.200	88,35	
019	Retri.Rumah Pot.Hewan:				
a	Retri.Rumah Pot.Hewan	55.392.000	52.877.500	95,46	
b	Retri.Kesehatan Ternak	10.608.000	9.963.800	93,93	
021	Retri.Temp.Rekreasi & Gor:				
a	Tempat rekreasi	62.000.000	102.289.825	164,98	
b	Gedung Olah Raga	20.000.000	20.608.000	103,04	
024	Retri.Penju.Produk.Usaha Daerah	12.000.000	10.995.000	91,63	
026	Retribusi I M B	150.000.000	218.768.150	145,85	
028	Retribusi Ijin Gangguan	110.000.000	148.322.786	134,84	
029	Retribusi Ijin Trayek	5.000.000	6.425.000	128,50	
	JUMLAH POS RETRIBUSI DAERAH	6.876.663.000	7.000.311.911	101,80	

1.2.3. POS BAGIAN LABA .....

1	2	3	4	5	6
1.2.3.	POS BAGIAN LABA USAHA DAERAH :				
1.2.3-001	Bank Pembangunan Daerah	0	0	0,00	
002	Perusah.Daerah Air Minum	220.000.000	237.971.850	108,17	
003	Perusah.Daerah Bank Pasar	230.000.000	243.984.150	106,08	
004	Perusda Apotik Waringin Mulyo	21.000.000	28.864.475	137,45	
005	Badan Kredit Kecamatan	35.000.000	10.156.126	29,02	
	JUMLAH POS BAGIAN LABA BUMD	506.000.000	520.976.601	102,96	
1.2.4	POS LAIN-LAIN PEND.ASLI DAERAH:				
1.2.4-001	Hasil Penjualan Milik Daerah	0	0	0,00	
002	Jasa Giro	605.000.000	965.806.786	159,64	
003	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0,00	
030	Penerimaan Lain-lain	31.300.000	220.017.477	702,93	
	JUMLAH LAIN-2 PEND.ASLI DAERAH	636.300.000	1.185.824.263	186,36	
	JUMLAH BAGIAN PADS :	10.104.963.000	11.194.675.460	110,78	
1.3.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN :				
1.3.1	POS BAGI HASIL PAJAK				
1.3.1-001	Pajak Bumi & Bangunan	4.036.656.000	5.875.931.235	145,56	
002	Bea Perol.Hak Atas Tnh&Bang	575.567.000	926.514.776	160,97	
003	PPH Pasal 21 dan OPDN	1.273.518.000	1.680.555.642	131,96	
	JUMLAH POS BAGI HASIL PAJAK	5.885.741.000	8.483.001.653	144,13	
1.3.2	POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK SDA:				
1.3.2-001	Iuran Hasil Hutan	10.000.000	1.422.179	14,22	
006	Iuran Hak Pengusahaan Hutan	150.000.000	0	0,00	
008	Minyak Bumi	8.000.000	26.122.766	326,53	
	JUMLAH POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK	168.000.000	27.544.945	16,40	
	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK :	6.053.741.000	8.510.546.598	140,59	
	JUMLAH PADS DAN BAGI HASIL	16.158.704.000	19.705.222.058	121,95	

=====rs2001=====

Temanggung,

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs.OERIP SOEKARJO

P e m b i n a
NIP. 500 041 897

DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
========rs2002=========

DAFTAR REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI
DAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2002

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN RP	REALISASI RP	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.2.	BAG.PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.2.1	POS PAJAK DAERAH				

1.2.1-006	Pajak Hotel	42.000.000	42.098.100	100,23	
007	Pajak Restoran	38.000.000	39.151.470	103,03	
008	Pajak Hiburan	20.000.000	22.297.245	111,49	
009	Pajak Reklame	90.000.000	90.026.111	100,03	
010	Pajak Penerangan jalan	2.465.000.000	2.897.347.676	117,54	
011	Pajak Galian Golongan C	7.500.000	8.269.047	110,25	
	Jumlah Pos Pajak Daerah	2.662.500.000	3.099.189.649	116,40	
1.2.2	POS RETRIBUSI DAERAH				

1.2.2-001	Retri.Pelayanan Kesehatan				
a	Puskesmas	533.013.000	523.534.955	98,22	
b	Rumah Sakit Umum (RSU)	6.900.000.000	5.894.666.433	85,43	
c	Calon Penganten	37.720.000	40.435.000	107,20	
002	Retri.Pelayanan Persampahan	175.000.000	178.098.500	102,28	
003	Retri.Penggan.Cetak KTP & Capil				
a	Retri.Penggan.Cetak KTP	200.000.000	221.466.000	110,73	
b	Retri.Akte Catatan Sipil	120.000.000	97.902.500	81,59	
004	Retri.Pelayanan Pemakaman	10.000.000	5.358.000	53,58	
005	Retri.Park.ditepi Jl.Umum	171.540.000	177.254.500	103,33	
006	Retribusi Pasar	1.000.000.000	1.106.887.550	110,69	
007	Ret.Pengujian Kend.Bermotor	450.000.000	451.017.900	100,23	
011	Retri.Pemakain Kekay.Daerah :				
a	Pener.Sewa Rm.Agesti Roso	6.600.000	6.800.000	100,00	
b	Pener. DPU (Mesin Gilas)	40.000.000	49.700.000	124,25	
c	Retribusi Sewa GOR	25.000.000	28.149.000	112,60	
d	Sewa Tanah Bengkol Kelurahan	281.280.000	278.915.500	99,16	
014	Retribusi Terminal	200.000.000	205.409.200	102,70	
015	Retribusi Tempat Khusus Parkir	80.000.000	86.877.000	108,60	
018	Retri.Rumah Pot.Hewan:				
a	Retri.Rumah Pot.Hewan	60.000.000	58.062.300	96,77	
b	Retri.Kesehatan Ternak	15.000.000	11.013.000	73,42	
021	Retribusi Tempat Rekreasi	100.000.000	104.522.540	104,52	
023	Retri.Penju.Produk.Usaha Daerah	15.000.000	14.205.000	94,70	
024	Retribusi I M B	225.000.000	251.162.695	111,63	
026	Retribusi Ijin Gangguan	200.000.000	528.745.138	264,37	
027	Retribusi Ijin Trayek	30.000.000	40.619.000	135,40	
028	Retribusi Ijin Tebang Angkut	100.000.000	207.723.003	207,72	
	JUMLAH POS RETRIBUSI DAERAH	10.975.153.000	10.569.224.714	96,30	

1.2.3. POS BAGIAN LABA .....

1	2	3	4	5	6
1.2.3.	POS BAGIAN LABA USAHA DAERAH :				
1.2.3-001	Bank Pembangunan Daerah	542.000.000	542.343.679	100,06	
002	Perusahaan Daerah Air Minum	250.000.000	251.076.450	100,43	
003	Perusahaan Daerah Bank Pasar	370.000.000	371.000.000	100,17	
004	Perusda Apotik Waringin Mulyo	26.000.000	30.064.334	115,63	
005	Badan Kredit Kecamatan	50.000.000	50.046.087	100,09	
006	Perusda Aneka Usaha	12.500.000	12.538.650	100,31	
	JUMLAH POS BAGIAN LABA BUMD	1.250.862.000	1.257.069.200	100,50	
1.2.4	POS LAIN-LAIN PEND.ASLI DAERAH:				
1.2.4-001	Hasil Penjualan Milik Daerah	35.000.000	90.550.00 0	258,71	
002	Jasa Giro	1.310.000.000	2.063.025.955	157,48	
003	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0,00	
004	Penerimaan Radio Temanggung	17.500.000	17.590.000	100,51	
005	Penerimaan Angsuran TP.TGR.	5.000.000	10.430.000	208,60	
030	Penerimaan Lain-lain	35.000.000	914.820.460	2.613,77	
	JUMLAH LAIN-2 PEND.ASLI DAERAH	1.402.500.000	3.096.416.415	220,78	
	JUMLAH BAGIAN PADS :	16.291.015.000	18.021.899.978	110,62	
1.3.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN :				
1.3.1	POS BAGI HASIL PAJAK				
1.3.1-001	Pajak Bumi & Bangunan	5.767.939.000	7.845.561.069	136,02	
002	Bea Perol.Hak Atas Tnh&Bang	1.120.000.000	1.118.154.444	99,84	
003	Pajak Penghasilan (PPh)	2.000.000.000	2.338.977.545	116,95	
	JUMLAH POS BAGI HASIL PAJAK	8.887.939.000	11.302.693.058	127,17	
1.3.2	POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK SDA:				
1.3.2-002	Iuran Hak Pengusahaan Hutan	150.000.000	387.192.580	258,13	
005	Iuran Kuasa Usaha Pertambangan	7.900.000	22.160.537	280,51	
007	Pungutan Hasil Perikanan	300.000.000	103.337.753	34,45	
008	Minyak Bumi	10.000.000	14.093.136	140,93	
	JUMLAH POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK	467.900.000	526.784.004	112,58	
	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK :	9.355.839.000	11.829.477.062	126,44	
	JUMLAH PADS DAN BAGI HASIL	25.646.854.000	29.851.377.040	116,39	

=====rs2002=====

Temanggung,
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs.OERIP SOEKARJO

Pembina Tk.I

DAFTAR TARGET DAN REALISASI PAD TAHUN 2003
DAN TARGET TAHUN 2004 KAB. TEMANGGUNG

NO	JENIS PENDAPATAN	TAHUN ANGGARAN 2003			RENCANA THN 2004
		TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
I	POS PAJAK DAERAH				
1	PAJAK HOTEL	47,500,000	48,888,300	102.92	48,000,000
2	PAJAK RESTORAN	50,000,000	50,920,500	101.84	50,000,000
3	PAJAK HIBURAN	23,500,000	23,940,625	101.88	18,000,000
4	PAJAK REKLAME	90,000,000	87,344,469	97.05	70,000,000
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	3,300,000,000	3,715,882,490	112.60	3,300,000,000
6	PAJAK PENGGALIAN & PENGG.GOL C	7,000,000	8,283,590	118.34	4,000,000
7	PAJAK PARKIR				-
	JUMLAH I	3,518,000,000	3,935,259,974		3,490,000,000
II	POS RETRIBUSI DAERAH				
1	RET.PELAYANAN KESEHATAN				
	PENERIMAAN PUSKESMAS	820,000,000	687,403,475	83.83	750,000,000
	RUMAH SAKIT UMUM	7,500,000,000	5,531,914,429	73.76	5,900,000,000
	CALON MEMPELAI	50,000,000	48,415,000	96.83	50,000,000
2	RET.SAMPAH DAN KEBERSIHAN				
	RUMAH TANGGA	110,000,000	118,022,350	107.29	110,000,000
	KANTOR PERUSAHAAN	15,000,000	23,167,100	154.45	15,000,000
	PASAR	65,000,000	68,086,100	104.75	65,000,000
3	RE.PEL.KPENDUDUKAN & CAPIL				
	PELAYANAN KEPENDUDUKAN	275,000,000	345,517,500	125.64	250,000,000
	AKTE CATATAN SIPIL	120,000,000	99,369,500	82.81	100,000,000
4	RET.PEL.MAKAM & TANAH KUBUR				
	PERMNT.PERPANJ.TANAH KUBUR	10,000,000	5,180,000	51.80	5,000,000
5	RET.PARKIR DI TEPI JALAN UMUM				
	RET.PARKIR DITEPI JL.UMUM	225,000,000	227,774,100	101.23	250,236,000
6	RET.PELAYANAN PASAR				
	PASAR TEMANGGUNG	685,000,000	722,567,550	105.48	471,900,000
	PASAR PARAKAN	299,000,000	330,722,300	110.61	330,776,000
	PASAR NGADIREJO	218,000,000	228,830,750	104.97	240,000,000
	PASAR KRANGGAN	102,000,000	120,810,400	118.44	113,747,000
	PASAR PINGIT	66,000,000	84,097,250	127.42	79,973,000
	PASAR CANDIROTO	30,000,000	32,089,900	106.97	31,426,000
7	RET.PENG. KEND. BERMOTOR				
	PENG. KEND. BERMOTOR	450,000,000	450,257,500	100.06	452,020,000
8	RET.PEMAK KEKAYAAN DAERAH				
	SEWA R.M. NGESTI ROSO	6,600,000	6,600,000	100.00	6,600,000
	SEWA MESIN GILAS	45,000,000	56,800,000	126.22	45,000,000
	SEWA GEUNG OLAHRAGA	27,500,000	27,683,500	100.67	28,000,000
	SEWA TANAH BENGKOK KELURAHAN	9,700,000	15,500,000	159.79	186,342,000
	SEWA TANAH LAMBIRAN PENGAIRAN	3,000,000	3,378,100	112.60	4,000,000
9	RET.JASA USAHA TERMINAL				
	TPR BUS	184,680,000	188,001,600	101.80	190,080,000
	TPR ANGKUDES	65,320,000	65,774,600	100.70	65,520,000
10	RET.TEMPAT KHUSUS PARKIR	100,000,000	101,566,800	101.57	105,300,000
11	RET.RUMAH POTONG HEWAN				
	RUMAH POTONG HEWAN	60,000,000	60,048,000	100.08	60,000,000
	PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK	12,000,000	11,875,900	98.97	12,005,000
12	RET.TEMPAT REKREASI DAN OR				
	SYAWALAN	22,500,000	22,400,000	99.56	22,500,000
	PIKATAN INDAH	39,300,000	53,108,000	135.13	39,300,000
	TIRTO ASRI	28,800,000	13,515,200	46.93	28,800,000
	KAWASAN PIKATAN INDAH	8,200,000	9,992,200	121.86	8,200,000
	KAWASAN TIRTO ASRI	6,200,000	4,285,000	69.11	6,200,000
	PEDAGANG ASONGAN/PENJAJA	5,000,000	4,200,200	84.00	5,000,000

2	3	4	5	6
RET.PENYEBRANGAN DI ATAS AIR				
PENJUALAN PROD. USAHA DAERAH				
BALAI BENIH IKAN	10,000,000	12,300,000	123.00	10,000,000
KOLAM AIR DERAS	5,000,000	2,700,000	54.00	4,000,000
RET.IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN				
BANGUNAN PERUMAHAN	110,000,000	119,166,920	108.33	110,000,000
BANGUNAN USAHA LAIN-LAIN	190,000,000	257,514,350	135.53	190,000,000
RET.IJIN GANGGUAN	219,600,000	251,044,199	114.32	205,500,000
RET.IJIN TRAYEK	30,000,000	30,423,500	101.41	25,000,000
RET.IJIN TEBANG ANGKUT	300,000,000	322,494,361	107.50	250,000,000
RET PERIJINAN BID.PERINDAG				
SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN	2,500,000	3,960,000	158.40	3,250,000
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	8,050,000	7,780,000	96.65	7,000,000
TANDA DAFTAR INDUSTRI	3,500,000	4,855,000	138.71	3,250,000
RET.IJIN USAHA JASA KONTRUKSI	25,000,000	29,050,000	116.20	600,000
JUMLAH II	12,567,450,000	10,810,242,634		10,836,525,000
POS HASIL PERUSH MILIK DAERAH				
BAG. LABA PERUSH MILIK DAERAH				
BANK PEMBANGUNAN DAERAH	443,000,000	443,000,000	100.00	
PERUSAHAAN DERAH AIR MINUM	250,000,000	250,000,000	100.00	250,000,000
BANK PASAR	441,395,000	441,395,000	100.00	515,751,000
APOTIK WARINGIN MULYO	30,000,000	30,054,078	100.18	40,727,000
BADAN KREDIT KECAMATAN	60,000,000	27,898,452	46.50	54,000,000
PERUSH.DAERAH ANEKA USAHA				
USAHA BID.PERTANIAN & PERKEBUNAN	42,000,000	30,000,000	71.43	106,000,000
USAHA BIDANG PERCETAKAN	50,000,000	17,000,000	34.00	75,000,000
USAHA BIDANG PERBENGKELAN	10,000,000	5,000,000	50.00	25,000,000
JUMLAH III	1,326,395,000	1,244,347,530		1,066,478,000
POS LAIN - LAIN PAD YANG SAH				
HASIL PENJUALAN ASET DAERAH	138,000,000	145,810,000	105.66	5,000,000
HASIL PENJUALAN PASAR KLIWON TMG				7,500,000,000
HASIL PENJUALAN PASAR NGADIREJO				8,141,000,000
JASA GIRO	1,600,000,000	1,377,426,437	86.09	1,600,000,000
SUMBANGAN PIHAK KETIGA				
PENERIMAAN RADIO TEMANGGUNG				
SPOT	9,500,000	9,908,000	104.29	13,300,000
SPONSOR	7,600,000	5,748,000	75.63	5,225,000
PENGUMUMAN	1,900,000	491,200	25.85	475,000
PENERIMAAN ANGGSR TP-TGR				
PENERIMAAN ANGGSR TP-TGR	5,000,000	8,320,000	166.40	5,000,000
PENERIMAAN LAIN-LAIN				
PENJUALAN DRUM ASPAL	6,500,000	8,530,000	131.23	6,500,000
DANA KONTRIBUSI BAGI DESA/PDAM	19,200,000	19,831,425	103.29	19,200,000
PENERIMAAN INSEMINASI BUATAN	60,000,000	60,000,000	100.00	60,000,000
PENJUALAN LOS/KIOS PASAR BARU	15,700,000,000	705,000,000	4.49	
PENERIMAAN LAINNYA	12,200,000	249,148,461	2,042.20	2,000,000
JUMLAH IV	17,559,900,000	2,590,213,523		17,357,700,000
JUMLAH I S/D IV (BAG PAD)	34,971,745,000	18,580,063,661		32,750,703,000
BAGIAN DANA PERIMBANGAN				
POS BAGI HASIL PAJAK				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	8,281,688,000	10,708,957,205	129.31	8,281,688,000
BPHTB	1,120,000,000	1,263,184,736	112.78	1,120,000,000
BAGI HASIL PPH Ps. 21	2,900,000,000	3,209,531,002	110.67	2,900,000,000
RESTITUSI KELEBIHAN SETORAN PPH PSL.21	2,166,000,000	2,532,550,468	116.92	82,000,000
JUMLAH V	14,467,688,000	17,714,223,411		12,383,688,000

	2	3	4	5	6
I	**POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK**				
	PENERIMAAN PROVINSI SDA HUTAN	150,000,000	364,187,680	242.79	150,000,000
	PENERIMAAN IURAN EKSPLORASI	7,900,000	46,700,294	591.14	7,900,000
	PUNGUTAN PENGUSAHA PERIKANAN	200,000,000	339,124,256	169.56	200,000,000
	PENERIMAAN DARI PERTAMBANGAN	10,000,000	18,486,556	184.87	10,000,000
	MINYAK BUMI				
	JUMLAH VI	367,900,000	768,498,786		367,900,000
I	**POS DANA ALOKASI UMUM**				
	DANA ALOKASI UMUM	221,660,000,000	221,660,000,000	100.00	228,086,000,000
	JUMLAH VII	221,660,000,000	221,660,000,000		228,086,000,000
I	**POS DANA ALOKASI KHUSUS**				
	POS DANA ALOKASI KHUSUS	7,500,000,000	7,500,000,000	100.00	7,120,000,000
	JUMLAH VIII	7,500,000,000	7,500,000,000		7,120,000,000
	POS BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEU DARI PROPINSI				
	BAGI HASIL PAJAK PROPINSI				
	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	1,963,000,000	1,963,000,000	100.00	4,251,000,000
	BBNKB	2,288,000,000	3,253,729,000	142.21	
	PAJAK BHN BAKAR KEND.BERMOTOR	2,864,000,000	3,191,563,000	111.44	2,864,000,000
	PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH	89,000,000	102,771,720	115.47	119,500,000
	PAJAK PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN	750,000	22,639,000	3,018.53	22,500,000
	BANTUAN KEUANGAN DR PROPINSI				
	BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMBANGUNAN	446,607,000	446,607,000	100.00	1,624,083,000
	PENERIMAAN DANA IN-GUB	500,000,000	500,000,000	100.00	
	BAGI HAIL SUMBANGAN PIHAK KETIGA KAYU	30,000,000	43,176,350	143.92	30,000,000
	BAGI HASIL RETRIBUSI PROPINSI				
	RETRIBUSI KELEBIHAN MUATAN	327,000,000	321,957,850	98.46	327,000,000
	JUMLAH IX	8,508,357,000	9,845,443,920		9,238,083,000
	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN				
	DAERAH YANG SAH				
	BANTUAN DANA KONTIJENSI				
	DANA PENYEIMBANG	15,303,000,000	15,303,300,000	100.00	12,049,000,000
	JUMLAH X	15,303,000,000	15,303,300,000		12,049,000,000
	JUMLAH I-X	302,778,690,000	291,371,529,778		301,995,374,000

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

SETYO PRAMONO, SE
Pembina Tk. I
NIP. 500 075 206

:MBUSAN :

Bupati Temanggung (sebagai laporan);
Arsip.

Lampiran : C. I

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

TANGGAL :
NOMOR :

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN
1999 / 2000

PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000

BAB I : PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTTO)	LEBIH (KURANG)	PENJELASAN		
1	2	3	4	5	6		
1.1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN LALU	3.162.103.000	3.162.103.039	39			
					Perda No.3 Tahun 1999 tanggal 8 Juli 1999		
1.1.1	Pos Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	3.162.103.000	3.162.103.039	39	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1998 / 1999 terdiri dari :	Rp	3.162.103.039
					a. Sisa Kas per 31-3-1999	Rp	2.924.054.292
1.1.1 - 001	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	3.162.103.000	3.162.103.039	39	b. Sisa UUDP per 31-3-1999	Rp	23.686.762
					c. Sisa UKP per 31-3-1999	Rp	214.361.985
						Rp	3.162.103.039
1.2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.473.250.000	6.180.422.475	707.172.475			
1.2.1	Pos Pajak Daerah	1.190.000.000	1.463.979.825	273.979.825			
1.2.1 - 004	Pajak Hotel dan Restoran	32.500.000	40.673.566	8.173.566	Lebih dari anggaran sebesar karena Intensifikasi pungutan	Rp	8.173.566
					Penerimaan ini terdiri dari :		
					a. Hotel	Rp	21.761.813
					b. Restoran	Rp	18.911.753
						Rp	40.673.566

1	2	3	4	5	6		
1.2.1 - 005	Pajak Hiburan	9.000.000	16.852.084	7.852.084	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	7.852.084
					Penerimaan pajak ini terdiri dari :		
					a. Bioskop	Rp	-
					b. Hiburan lainnya	Rp	16.852.084
						Rp	16.852.084
	006 Pajak Reklame	34.000.000	37.290.626	3.290.626	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	3.290.626
					Karena Intensifikasi pungutan		
					Penerimaan ini terdiri dari :		
					a. Reklame tahunan/tetap	Rp	28.158.266
					b. Reklame temporer	Rp	9.132.360
						Rp	37.290.626
	007 Pajak Penerangan Jalan	1.014.500.000	1.259.733.453	245.233.453	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	245.233.453
					karena meningkatnya penggunaan daya PLN		
					Penerimaan ini terdiri dari :		
					a. PLN Ranting Temanggung	Rp	678.801.942
					b. PLN Ranting Parakan	Rp	580.931.511
						Rp	1.259.733.453
	008 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	5.000.000	5.494.381	494.381	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	494.381
					Karena adanya pemasukan tunggakan retri-		
					busi Gol.C dari Propinsi disamping pajak yang		
					dikelola oleh Kabupaten		
	009 Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	95.000.000	103.935.715	8.935.715	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	8.935.715
					Karena Intensifikasi pungutan dan masuknya		
					setoran ABT dari PDAM		
					TA 1998/1999 ke dalam TA 1999/2000		
					a. Pajak ABT	Rp	8.435.640
					b. Pajak APT	Rp	500.075
						Rp	8.935.715

1	2	3	4	5	6		
1.2.2	Pos Retribusi Daerah	3.883.750.000	4.293.322.586	409.572.586			
1.2.2 - 001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.690.000.000	2.963.261.801	273.261.801	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	273.261.801
					Penerimaan ini terdiri dari :		
					a. Penerimaan Puskesmas	Rp	395.906.450
					b. RSU dan BP RSU	Rp	2.567.355.351
					Karena banyaknya pasien rawat inap	Rp	2.963.261.801
002	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	80.000.000	80.799,850	799.850	Lebih dari anggaran sebesar karena , intensifikasi pungutan	Rp	799.850
					Penerimaan ini terdiri dari :		
					Retribusi Pelayanan Persampahan , Temanggung , Parakan , Ngadirejo.	Rp	80.799.850
003	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akte Catatan Sipil	165.000.000	165.016.000	16.000	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	16.000
					Karena adanya Sosialisasi KTP di Kecamatan dan Operasi Yustisi di 3 Wilayah Pembantu Bupati.		
					Penggantian biaya cetak KTP dan Akte Capil sebesar	Rp	165.016.000
004	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.000.000	10.783.750	5.783.750	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	5.783.750
					Karena meningkatnya permohonan/pemesanan tanah kubur dari luar daerah di lokasi makam gumuk Tugel Suropadan, disamping adanya perpanjangan ijin makam/tanah kubur		
					Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar	Rp	10.783.750

1	2	3	4	5	6		
005	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	126.000.000	135.134.700	9.134.700	Lebih dari anggaran sebesar Karena intensifikasi pungutan Penerimaan ini merupakan perparkiran se Kabupaten Temanggung	Rp	9.134.700
006	Retribusi Pasar	490.000.000	563.950.525	73.950.525	Lebih dari anggaran sebesar Karena intensifikasi pungutan Penerimaan ini terdiri dari penerimaan pasar : a. Temanggung b. Parakan c. Ngadirejo d. Kranggan e. Pingit f. Candiroto	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	73.950.525 223.848.000 137.741.950 121.724.650 37.129.325 25.248.400 18.258.200
						Rp	563.950.525
012	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.250.000	56.699.000	24.449.000	Lebih dari anggaran sebesar Karena meningkatnya peminjam mesin gilas untuk proyek dan Desa	Rp	24.449.000
014	Retribusi Terminal	70.000.000	68.496.000	(1.504.000)	Berkurang dari anggaran sebesar Penerimaan ini terdiri dari a. TPR Bus b. TPR Non Bus Karena adanya kendala dilapangan di- mana Bus yang beroperasi saling bergantian karena mahalnya suku cadang .	Rp Rp Rp Rp	(1.504.000) 62.361.700 6.134.300 68.496.000
019	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000	30.232.350	232.350	Lebih dari anggaran sebesar Karena meningkatnya pemotongan hewan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ternak yang di perdagangkan	Rp	232.350

1	2	3	4	5	6
					Penerimaan ini terdiri dari :
					a. Pemotongan babi12 ekor a.Rp7.500 Rp 90.000
					b. Ternak besar 3.142 ekor a.Rp.4.500 Rp 14.134.500
					c. Ternak kecil 2.922 ekor a.Rp. 500 Rp 1.461.000
					d. Sewa kandang 3.141 a. Rp. 500 Rp 1.570.500
					e. Pemeriksaan ulang daging dari luar daerah 18.703 kg a. Rp. 150 Rp 2.805.450
					Jumlah (1) Rp 20.061.450
					Penerimaan dari Dinas Peternakan
					Penerimaan ini terdiri dari :
					a. Ternak Besar 9.015 ekor a Rp. 500 Rp 4.507.500
					b. Ternak Kecil 37.756 ekor a Rp. 150 Rp 5.663.400
					Jumlah (2) Rp 10.170.900
					Jumlah (1 + 2) Rp 30.232.350
021	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	56.500.000	62.001.180	5.501.180	Lebih dari anggaran sebesar Rp 5.501.180 Karena meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada waktu Pekan Syawalan
					Penerimaan terdiri dari :
					a. Pikatan Rp 11.588.550
					b. Tirto Asri Rp 27.839.630
					c. Lapangan Tenis Rp 22.573.000
					Rp 62.001.180
024	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	9 000.000	9.000.000	0	
026	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	115.000.000	122.946.880	7.946.880	Lebih dari anggaran sebesar Rp 7.946.880 karena meningkatnya pemohon IMB Perumahan

1	2	3	4	5	6		
028	Retribusi Izin Gangguan	15.000.000	25.000.550	10.000.550	Lebih dari anggaran sebesar Karena Intensifikasi pungutan yang dilaksanakan oleh Tim	Rp	10.000.550
1.2.3	**Pos Bagian Laba B U M D**	284.500.000	216.589.380	(67.910.620)			
1.2.3 - 001	Bank Pembangunan Daerah	85.000.000	0	(85.000.000)	Kurang dari anggaran sebesar Berdasarkan Surat Mendagri No.570/2665/ PUOD Tgl. 19-8-1998, tentang penangguhan pembagian Deviden dan Dana Pembangunan Daerah selama 3 tahun.	Rp	(85.000.000)
002	Perusahaan Daerah Air Minum	120.000.000	122.233.500	2.233.500	Lebih dari anggaran sebesar - karena bertambahnya langganan sambungan ke rumah-rumah - Penerimaan yang disetor ke Kas Daerah adalah 60 % dari laba bersih	Rp	2.233.500
003	Perusahaan Daerah Bank Pasar	50.000.000	56.846.200	6.846.200	Lebih dari anggaran sebesar Karena penurunan suku bunga Bank Penerimaan yang disetor ke Kas Daerah adalah 50 % dari laba bersih	Rp	6.846.200
004	Apotik Waringin Mulyo	12.000.000	15.033.330	3.033.330	Lebih dari anggaran sebesar Karena omset penjualan obat naik Penerimaan yang disetor ke Kas Daerah adalah 50 % dari laba bersih	Rp	3.033.330
005	Badan Kredit Kecamatan (BKK)	17.500.000	22.476.350	4.976.350	Lebih dari anggaran sebesar - Karena penarikan Kredit non lancar, peningkatan kinerja Intensifikasi dan Sosialisasi - Penerimaan yang disetor ke Kas Daerah adalah 50 % dari laba bersih	Rp	4.976.350

1	2	3	4	5	6		
1.2.4	Pos Lain-lain Pendapatan	115.000.000	206.530.684	91.530.684			
1.2.4 - 001	Hasil Penjualan Milik Daerah	0	0	0			
002	Jasa Giro	70.000.000	133.378.263	63.378.263	Lebih dari anggaran sebesar Penerimaan ini diperoleh dari Jasa Giro Kas Daerah yang ada di BPD Cabang Temanggung	Rp	63.378.263
030	Penerimaan Lain - lain	45.000.000	73.152.421	28.152.421	Lebih dari anggaran sebesar Penerimaan ini terdiri dari :	Rp	28.152.421
					a. Sewa Tanah Bengkok	Rp	200.000
					b. Hasil Bongkaran Gedung Setda	Rp	15.000.000
					c. Penjualan Drum Aspal 718 bh a.Rp2.5(	Rp	1.796.000
					d. Sisa Tahun Lalu	Rp	42.854.713
					e. Hasil Kebun Pemda	Rp	2.523.450
					f. Ijin Oprit	Rp	357.500
					g. Sewa Tanah Pemda	Rp	182.490
					h. Bunga Titipan Bendaharawan	Rp	1.170.496
					i. Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp	7.623.000
					j. Pengembl. Gaji/Honor dan denda Proye	Rp	1.444.772
						Rp	73.152.421

1		2	3	4	5	6		
1.3		BAGIAN PENDAPATAN DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	63.178.913.000	62.341.906.707	(837.006.293)			
1.3.1.		Pos Bagi Hasil Pajak	3.206.275.000	5.939.131.002	2.732.856.002			
1.3.1 -	001	Pajak Bumi dan Bangunan	2.849.275.000	4.037.777.748	1.188.502.748	Lebih besar dari anggaran sebesar karena adanya penambahan realisasi PBB pertambangan dan bagian 10 % dari Pusat, disamping intensifikasi pungutan PBB per-kotaan/pedesaan .Penerimaan ini terdiri :	Rp	1.188.502.748
						a. Pedesaan / Perkotaan	Rp	1.772.292.885
						b. Perkebunan	Rp	47.616.652
						c. Perhutanan	Rp	294.102.956
						d. Pertambangan	Rp	1.164.528.187
						e. 10 % dari Pusat Insentif pencapai targe tahun anggaran 1997 / 1998	Rp	759.237.068
							Rp	4.037.777.748
	002	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	70.000.000	131.150.179	61.150.179	Lebih besar dari anggaran sebesar Penerimaan ini adalah 64 % bagian Kabupaten.	Rp	61.150.179
	003	Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor	287.000.000	1.770.203.075	1.483.203.075	Lebih besar dari anggaran sebesar karena berlakunya Perda Tingkat I tentang PBB-KB Penerimaan ini adalah 90 % bagian Kabupaten.	Rp	1.483.203.075
	004	Bagi Hasil Pajak dari Tingkat I (PKB /BBNKB)	-	-				
1.3.2		Pos Bagi hasil Bukan Pajak	22.000.000	38.896.762	16.896.762			
1.3.2 -	001	Iuran Hasil Hutan (IHH)	10.000.000	15.410.830	5.410.830	Lebih besar dari anggaran sebesar Penerimaan ini merupakan realisasi penerimaan Kabupaten yang diperoleh dari Propinsi	Rp	5.410.830

1		2	3	4	5	6
	003	Penerimaan Hak Atas Tanah Negara.	12.000.000	23.485.932	11.485.932	Lebih besar dari anggaran sebesar Rp 11.485.932 Meningkatnya permohonan merubah tanah HGB menjadi Hak Milik
	006	Bagi Hasil dari Tingkat I	0	0	0	
1.3.3		**Pos Dana Rutin**	50.660.949.000	46.968.398.548	(3.692.550.452)	
1.3.3 -	001	Dana Belanja Pegawai	48.724.380.000	45.031.829.548	(3.692.550.452)	Berdasarkan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan lainnya untuk TA.1999 / 2000
	002	DanaBelanja Non Pegawai	1.936.569.000	1.936.569.000	0	
1.3.4		**Pos Dana Pembangunan Daerah**	8.523.595.000	8.523.595.000	0	
1.3.4 -	001	Dana Pembangunan Daerah	8.523.595.000	8.523.595.000	0	
1.3.5		**Pos Penerimaan lainnya**	766.094.000	871 885.395	105.791.395	
1.3.5 -	001	Bantuan Pembangunan dari Dati I (2P.0.A)	299.566.000	299.566.670	670	
	002	Penerimaan PBB untuk Pemerintahan Desa / Kelurahan	109.782.000	108.224.000	(1.558.000)	Bagian Pemerintahan Desa / Kelurahan berdasarkan Realisasi s.d Pebruari 2000
	003	Penerimaan Pajak / Retribusi untuk Pemerintahan Desa / Kelurahan	319.037.000	428.401.000	109.364.000	Bagian Pemerintahan Desa / Kelurahan berdasarkan Realisasi s.d Pebruari 2000
	004	Sumbangan Dati I Kepada Dinas P Dan K Tingkat II	34.410.000	34.410.000	0	

1	2	3	4	5	6
005	Sewa Tanah dan Bangunan dari tingkat I	3.299.000	1.283.725	(2.015.275)	Berdasarkan Realisasi yang diterima dari Propinsi
1.4	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	0	0	0	
1.4.1	Pos Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0	0	0	
	- Tidak ada -				
1.4.2	Pos Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	0	0	0	
1.4.2.001	Pinjaman dari BPD Jateng	0	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (BAGIAN 1.1 s.d. 1.4)	71.814.266.000	71.684.432.221	(129.833.779)	

1.5		BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	**10.227.696.000**	**8.676.853.148**	**(1.550.842.852)**
1.5.1		Pos Urusan Kas & Perhitungan	10.227.696.000	8.676.853.148	(1.550.842.852)
1.5.1 -	001	Iuran Wajib Pegawai	3.516.550.000	2.296.173.047	(1.220.376.953)
	002	Potongan beras	5.191.793.000	4.090.381.071	(1.101.411.929)
	003	Penerimaan Pajak Penghasilan	1.137.573.000	1.902.580.030	765.007.030
	004	Penerimaan amal Bhakti KORPRI	0	0	0
	005	Penerimaan Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai	381.780.000	387.719.000	5.939.000

RINGKASAN

1	2	3	4	5	6
1.1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	3.162.103.000	3.162.103.039	39	
1.1.1.	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	3.162.103.000	3.162.103.039	39	
1.2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.473.250.000	6.180.422.475	707.172.475	
1.2.1	Pos Pajak Daerah	1.190.000.000	1.463.979.825	273.979.825	
1.2.2	Pos Retribusi Daerah	3.883.750.000	4.293.322.586	409.572.586	
1.2.3	Pos Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah	284.500.000	216.589.380	(67.910.620)	
1.2.4	Pos Lain - lain Pendapatan	115.000.000	206.530.684	91.530.684	
1.3.	BAGIAN PENDAPATAN YANG BER-ASAL DARI PEMBERIAN PEMERIN-TAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	63.178.913.000	62.341.906.707	(837.006.293)	
1.3.1	Pos Bagi Hasil Pajak	3.206.275.000	5.939.131.002	2.732.856.002	
1.3.2	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	22.000.000	38.896.762	16.896.762	
1.3.3	Pos Dana Ritin Daerah	50.660.949.000	46.968.398.548	(3.692.550.452)	
1.3.4	Pos Dana Pembangunan Daerah	8.523.595.000	8.523.595.000	0	
	Pos Penerimaan Lainnya	766.094.000	871.885.395	105.791.395	
1.4	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	0	0	0	
1.4.1	Pos Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0	0	0	
1.4.2	Pos Pinjaman dari lembaga Keuangan Dalam Negeri	0	0	0	
	JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (1.1 S.D 1.5)	71.814.266.000	71.684.432.221	(129.833.779)	
1.5	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	10.227.432.000	8.676.853.148	(1.550.578.852)	

Lampiran : C / I

PERDA NO. :

TANGGAL :

PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN
2000

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2000

BAB I : PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTTO)	LEBIH (KURANG)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
1.1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN LALU	3.725.479.000	3.725.479.177	177	
1.1.1	Pos Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	3.725.479.000	3.725.479.177	177	
1.1.1 - 000	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	3.725.479.000	3.725.479.177	177	
1.2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.721.027.000	5.179.897.064	458.870.064	
1.2.1	Pos Pajak Daerah	1.017.700.000	864.247.774	(153.452.226)	
004	Pajak Hotel dan Restoran	32.500.000	37.724.516	5.224.516	Perda No.6 Tahun 1998 Tanggal, 29 September 1998 Disyahkan dengan Kepmendagri No. 979.33-054 Tgl.24 Pebruari 1999

1.2.1 -	005	Pajak Hiburan	9.000.000	16.465.000	7.465.000	Perda No.7 Tahun 1998 Tanggal, 29 September 1998 Disyahkan dengan Kepmendagri No.973.33-054 Tgl.24 Peb 1999
	006	Pajak Reklame	27.000.000	43.402.526	16.402.526	Perda No.9 Tahun 1998 Tanggal, 29 September 1998 Disyahkan dengan Kepmendagri No.973.33-054 Tgl.24 Peb.1999
	007	Pajak Penerangan Jalan	875.000.000	681.780.585	(193.219.415)	Perda No.9 Tahun 1998 Tanggal, 29 September 1998 Disyahkan dengan Kepmendagri No.973.33-054 Tgl.24 Peb.1999
	008	Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Golongan C	2.700.000	10.017.223	7.317.223	Perda No.4 Th.1998 Tgl.9-6-'98 Disyahkan dgn Kepmendagri Tgl. 25-9-1998 No.973.33.836 Diundangkan Tgl.8-10-1998 dengan LD No.11 Tahun 1998
	009	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	71.500.000	74.857.924	3.357.924	Perda No.3 Th.1998 Tgl.9-7-'98 Disyahkan dgn Kepmendagri Tgl. 25-9-1998 No.923.33.836 Diundangkan Tgl.8-10-1998 dengan LD No.10 Tahun 1998
1.2.2		Pos Retribusi Daerah	3.178.077.000	3.556.063.574	377.986.574	
1.2.2 -	001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.235.000.000	2.313.678.449	78.678.449	Perda RSU : Perda No.11 Th.1997 Tgl.11-11 1997 Disyahkan Tgl.17-2-1998 No.188.3/52/1998 Diundangkan dengan LD No.3 Th.1998 Tgl. 31-3-1998.

002	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	85.000.000	79.084.900	(5.915.100)	Perda No.16 Th.1995 Tgl.18-10-1995 Disyahkan tgl.17-1-1998 No.188.3/13/98 Diundangkan dengan LD No.7 Th.1998 tanggal 2-4-1998
003	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	75.000.000	82.355.000	7.355.000	Perda No.20 th.1994 Tgl.5-12-1994 Disyahkan Tgl.18-5-1995 No.188.3/123/95 Diundangkan dengan LD Seri B.3 No.11 Tahun 1995 tanggal 13-6-1995.
004	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.000.000	8.118.500	3.118.500	Perda No.13 Th.1994 tgl.21-9-1994 Disyahkan tgl.3-2-1995 No.188.3/12/95 Diundangkan dengan LD Seri B.1 No.1 Tahun 1995 tanggal, 22-2-1995.
005	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	101.000.000	105.788.800	4.788.800	Perda No.7 Tahun 2000 Tanggal 18 Oktober 2000 Diundangkan Tanggal 23 Oktober 2000 Nomor 14 Tahun 2000
006	Retribusi Pasar	385.000.000	519.982.795	134.982.795	Perda No.3 th.1994 tgl.19-2-94 disyahkan tanggal,9-6-1994 No.188.3/221/94 Diundangkan dengan LD Seri B.1 NO.4 Tahun. 1994 tanggal, 26-8-1994.
012	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	29.500.000	57.296.000	27.796.000	Surat Gubernur Jawa Tengah No. 903/376 Tanggal 12 Maret 1999
014	Retribusi Terminal	52.500.000	55.672.300	3.172.300	Perda No.5 Tahun 2000 Tanggal 8 September Diundangkan Tanggal 9 September 2000 Nomor 10 Tahun 2000

	019	Retribusi Rumah Potong Hewan	22.577.000	27.632.150	5.055.150	Perda No. 6 tahun 2000 tanggal 8 September 2000 Diundangkan Tanggal 9 September 2000 Nomor 11 tahun 2000
	021	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	35.000.000	42.442.690	7.442.690	Perda No. 4 Tahun 2000 Tanggal 8 September 2000 Diundangkan Tanggal 9 September 2000 Nomor 9 Tahun 2000
	024	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	7.500.000	7.504.000	4.000	Surat Gubernur Jawa Tengah No.903/376 Tanggal 12 Maret 1999
	026	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	85.000.000	118.849.275	33.849.275	Perda No.19 Th.1995 tgl.27-12-1995 Disyahkan tgl.4-7-1996 No.188.3/246/96 Diundangkan dengan LD NO.5 Th.1997 tgl. 27-2-1997
	028	Retribusi Izin Gangguan	60.000.000	137.658.715	77.658.715	Perda No.2 Th.1999 Tgl.9 April 1999 Disyahkan Kepmendagri tanggal 18 Agustus 1999 No.974.503.33-876 Diundangkan dengan Lembaran Daerah Perda No.8 Th.1999 Tgl.9 September 1999
1.2.3		Pos Bagian Laba B U M D	307.750.000	329.728.000	21.978.000	
1.2.3 -	001	Bank Pembangunan Daerah	63.750.000	0	(63.750.000)	
	002	Perusahaan Daerah Air Minum	150.000.000	150.000.000	0	Perda Tgl.5-3-1986 No.3 Th.1986 Disyahkan Tgl.1-5-1986 No. 188.3/12/86 Lembaran Daerah Seri B Tgl.23-5-1986 No.3 Tgl. 23-5-1986

	003	Perusahaan Daerah Bank Pasar	60.000.000	145.000.000	85.000.000	Perda No.18 Th.1995 Tgl.22-11-1995 disyahkan Tgl.3 Juni 1996 No.188.3/143/1996 Diundangkan dengan Lembaran Daerah Perda No.3 Th.1997 Tgl.27 Pebruari 1997
	004	Apotik Waringin Mulyo	14.000.000	14.000.000	0	Perda No.10 th.1990 tgl 22-09-1990 Disyahkan tgl.22-10-1990 No.188.3/391/1990 Diundangkan dengan LD seri D.3 No.3 Tahun 1991 tanggal. 11-5-1991.
1.2.3-005		Badan Kredit Kecamatan (BKK)	20.000.000	20.728.000	728.000	Perda Prop.Jawa Tengah tgl. 16-4-1981 Nomor11 Tahun1981 Disyahkan tgl.17-12-1981 No. 581.053-3-884 LD Seri D Tgl. 24-12-1981 Nomor 103 Tanggal 24-12-1981
1.2.4		**Pos Lain-lain Pendapatan**	**217.500.000**	**429.857.716**	**212.357.716**	
1.2.4 -	001	Hasil Penjualan Milik Daerah	0	0	0	
	002	Jasa Giro	60.000.000	99.999.765	39.999.765	Keputusan Direksi PT. Bank BPD Jateng No. 0195/HT 01.01/1999 Tgl. 1-9-1999
	030	Penerimaan Lain - lain	157.500.000	329.857.951	172.357.951	Surat Gubernur Jawa Tengah No.903/376 Tanggal 12 Maret 1999

1.3		**BAGIAN PENDAPATAN DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI**	**65.100.091.000**	**65.179.688.265**	**79.597.265**	
1.3.1.		**Pos Bagi Hasil Pajak**	**4.446.760.000**	**7.104.707.157**	**2.657.947.157**	
1.3.1 -	001	Pajak Bumi dan Bangunan	2.809.400.000	4.507.288.712	1.697.888.712	UU.RI No.12 Th.1985 Ttg PBB LN.RI No.68 Th.1985 Tambahan LN.RI No.3312 .
	002	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	52.800.000	190.010.574	137.210.574	Perda Tingkat I Jawa Tengah
	003	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.074.560.000	1.897.407.871	822.847.871	Perda Tingkat I Jawa Tengah
	004	Bagi Hasil Pajak dari Tingkat I (PKB-BBNKB)	510.000.000	510.000.000	0	Surat Kawat Gub.Kdh Tk.I Jawa Tengah Tanggal 30-6-1998 No.970/12209
1.3.2		**Pos Bagi hasil Bukan Pajak**	**10.000.000**	**47.565.806**	**37.565.806**	
1.3.2 -	001	Iuran Hasil Hutan (IHH)	7.500.000	17.636.716	10.136.716	Keppres RI Nomor 22 Tahun 1985 Tanggal 21 November 1985
	003	Penerimaan Hak Atas Tanah Negara.	2.500.000	29.929.090	27.429.090	
	006	Bagi Hasil dari Tingkat I	0	0	0	

1		2	3	4	5	6
1.3.3		**Pos Dana Rutin Daerah**	**46.725.319.000**	**43.625.509.593**	**(3.099.809.407)**	
1.3.3 -	001	Dana Belanja Pegawai	45.051.379.000	41.951.569.644	(3.099.809.356)	
	002	DanaBelanja Non Pegawai	1.673.940.000	1.673.939.949	(51)	
1.3.4		**Pos Dana Pembangunan Daerah**	**13.892.723.000**	**13.892.723.000**	**0**	
1.3.4 -	001	Dana Pembangunan Daerah	13.892.723.000	13.892.723.000	0	
1.3.5		**Pos Penerimaan lainnya**	**25.289.000**	**509.182.709**	**483.893.709**	
1.3.5 -	001	Bantuan Pembangunan dari Dati I (2P.0.A)	25.289.000	25.288.800	(200)	
	002	Penerimaan PBB untuk Pemerintahan Desa / Kelurahan	0	86.411.000	86.411.000	
	003	Penerimaan Pajak / Retribusi untuk Pemerintahan Desa / Kelurahan	0	396.958.000	396.958.000	
	004	Sumbangan Dati I Kepada Dinas P Dan K Tingkat II	0		0	
	005	Sewa Tanah dan Bangunan dari Tingkat I	0	524.909	524.909	
1.4		**BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH**	**0**	**0**	**0**	
1.4.1		**Pos Pinjaman dari Pemerintah Pusat**	**0**	**0**	**0**	
		- Tidak ada -				

1.4.2		**Pos Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri**	0	0	0
1.4.2 -	001	Pinjaman dari BPD Jateng	0	0	0
		JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (BAGIAN 1.1 s.d. 1.4)	73.546.597.000	74.085.064.506	538.467.506

1.5. BAGIAN UKP . . . . .

1.5		BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	7.670.733.000	3.455.838.744	(4.214.894.256)	
1.5.1		Pos Urusan Kas & Perhitungan	7.670.733.000	3.455.838.744	(4.214.894.256)	
1.5.1 -	001	Iuran Wajib Pegawai	2.637.413.000	1.767.917.033	(869.495.967)	Keppres No.8 th 1977 tentang Iuran Wajib Pegawai
	002	Potongan beras	3.893.805.000	0	(3.893.805.000)	
	003	Penerimaan Pajak Penghasilan	853.180.000	1.390.821.711	537.641.711	
	004	Penerimaan Amal Bhakti KORPRI	0	0	0	
	005	Penerimaan Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai	286.335.000	297.100.000	10.765.000	

RINGKASAN
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000

KODE ANGGARAN	U R A I A N	ANGGARAN TAHUN YANG LALU (2000)	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTTO)	BERLEBIH (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1.1	**BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU**	3.725.479.000	3.725.479.177	177
1.2	**BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**	4.721.027.000	5.179.897.064	458.870.064
1.2.1	Pos Pajak Daerah	1.017.700.000	864.247.774	(153.452.226)
1.2.2	Pos Retribusi Daerah	3.178.077.000	3.556.063.574	377.986.574
1.2.3	Pos Bagian Laba Usaha Daerah	307.750.000	329.728.000	21.978.000
1.2.4	Pos Lain - lain Pendapatan Yang Sah	217.500.000	429.857.716	212.357.716
1.3	**BAGIAN PENDAPATAN DARI PEMBERI AN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI**	65.100.091.000	65.179.688.265	79.597.265
1.3.1	Pos Bagi Hasil Pajak	4.446.760.000	7.104.707.157	2.657.947.157
1.3.2	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	10.000.000	47.565.806	37.565.806
1.3.3	Pos Dana Rutin Daerah	46.725.319.000	43.625.509.593	(3.099.809.407)
1.3.4	Pos Dana Pembangunan Daerah	13.892.723.000	13.892.723.000	
1.3.5	Pos Dana Penerimaan Lainya	25.289.000	509.182.709	483.893.709
1.4	**BAGIAN PINJAMAN DAERAH**	0	0	0
1.4.1	Pos Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0
1.4.2	Pos Pinjaman Luar Negeri	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	73.546.597.000	74.085.064.506	538.467.506
1.6	**BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN**	7.670.733.000	3.455.938.744	(4.214.794.256)
1.6.1	**Pos Urusan Kas & Perhitungan**	7.670.733.000	3.455.938.744	(4.214.794.256)

DAFTAR : JUMLAH - JUMLAH YANG DIBUKUKAN DALAM
AYAT ." PENERIMAAN LAIN - LAIN "

LAMPIRAN I.
C.V

NOMOR	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Sewa Tanah Bengkok	159.155.000	
3.	Penjualan Drum Aspal	2.191.500	
	PPh Ps. 21	45.688.900	
5.	Hasil Kebun Pemda	2.682.400	
6.	Biaya Oprit	500.000	
	Denda Proyek	8.073.625	
9.	UUDP dll	111.566.526	
	JUMLAH	329.857.951	

Lampiran : C / I

PERDA NO. :

TANGGAL :

PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN
2001

PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2001

BAB I : PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTTO)	LEBIH (KURANG)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
1.1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN LALU	4.898.898.000	4.898.898.511	511	
1.1.1	Pos Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	4.898.898.000	4.898.898.511	511	
1.1.1 - 000	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	4.898.898.000	4.898.898.511	511	Perda No.16 Tahun 2001 Tanggal 18 Juni 2001
1.2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.104.963.000	11.194.675.460	1.089.712.460	
1.2.1	Pos Pajak Daerah	2.086.000.000	2.487.562.685	401.562.685	
1.2.1 - 004	Pajak Hotel dan Restoran	55.000.000	63.716.789	8.716.789	Perda No.6 Tahun 1998 Tanggal, 29 September 1998 Disyahkan dengan Kepmendagri No.973.33-054 Tgl.24 Peb.1999 Diundangkan dlm LD No.2 tahun 1999 tanggal 5 April 1999
1.2.1 - 005	Pajak Hiburan	16.000.000	19.155.813	3.155.813	Perda No.7 Tahun 1998 Tanggal, 29 September 1998 Disyahkan dengan Kepmendagri No.973.33-054 Tgl.24 Peb 1999

006	Pajak Reklame	50.000.000	70.301.525	20.301.525	Perda No.8 Tahun 1998 Tanggal, 29 September 1998 Disyahkan dengan Kepmendagri No.973.33-054 Tgl.24 Peb.1999
007	Pajak Penerangan Jalan	1.850.000.000	2.209.746.449	359.746.449	Perda No.9 Tahun 1998 Tanggal, 29 September 1998 Disyahkan deng Kepmendagri No.973.33-054 Tgl.24 Peb.1999
008	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	5.000.000	6.351.631	1.351.631	Perda No.4 Th.1998 Tgl.9-6-'98 Disyahkan dgn Kepmendagri Tgl. 25-9-1998 No.973.33.836 Diundangkan Tgl.8-10-1998 dengan LD No.11 Tahun 1998
009	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	110.000.000	118.290.478	8.290.478	Perda No.3 Th.1998 Tgl.9-7-'98 Disyahkan dgn Kepmendagri Tgl. 25-9-1998 No.923.33.836 Diundangkan Tgl.8-10-1998 dengan LD No.10 Tahun 1998

1	2	3	4	5	6
1.2.2	**Pos Retribusi Daerah**	**6.876.663.000**	**7.000.311.911**	**123.648.911**	
1.2.2 - 001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.909.063.000	4.576.789.500	(332.273.500)	Perda RSU : Perda No.11 Th.1997 Tgl.11-11-1997 Disyahkan Tgl.17-2-1998 No.188.3/52/1998 Diundangkan dengan LD No.3 Th.1998 Tgl. 31-3-1998 Perda Puskesmas : Perda No.6 Th.1997 Tgl. 13 Oktober 1997 Disyahkan Tgl.17-2-1998 No.188.3/5/1998 Diundangkan dengan LD No.2 Th.1998 Tgl. 31-3-1998
002	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	140.000.000	160.975.900	20.975.900	Perda No.17 Th.2001 Tgl.13-8-2001 Diundangkan dengan LD No.61 Tahun 2001 tanggal 14-8-2001
003	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	260.000.000	258.855.500	(1.144.500)	Perda No.20 th.1994 Tgl.5-12-1994 Disyahkan Tgl.18-5-1995 No.188.3/123/95 Diundangkan dengan LD Seri B.3 No.11 Tahun 1995 tanggal 13-6-1995.
004	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	10.000.000	7.827.000	(2.173.000)	Perda No.13 Th.1994 tgl.21-9-1994 Disyahkan tgl.3-2-1995 No.188.3/12/95 Diundangkan dengan LD Seri B.1 No.1 Tahun 1995 tanggal, 22-2-1995.
005	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	85.000.000	64.744.900	(20.255.100)	Perda No.7 Tahun.2000 Tanggal,18-10-2000 Diundangkan Tgl. 23-10-2000 Dengan LD No. 14 Tahun 2000

1	2	3	4	5	6
006	Retribusi Pasar	660.000.000	861.953.550	201.953.550	Perda No.2 th.2001 tgl.10-4-2001 Diundangkan dengan LD No.7 Tahun 2001 tanggal, 17-4-2001
008	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	125.000.000	187.145.700	62.145.700	Perda No.18 Tahun 2001 Tanggal 13 Agustus 2001 Diundangkan dengan LD No.62 Tanggal 14-8-2001
012	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	47.600.000	72.618.000	25.018.000	Perda No.14 th.1995 tgl.6-9-95 disyahkan tanggal,28-11-1995 No.188.3/378/95 Diundangkan dengan LD Tgl.20-2-1996 No.9 Tahun 1996.
014	Retribusi Terminal	140.000.000	172.885.600	32.885.600	Perda No.5 tahun.2000 Tanggal 8 September 2000 Diundangkan Tgl. 9 September 2000 Nomor 10 Tahun 2000
015	Retribusi Tempat Khusus Parkir	75.000.000	66.265.200	(8.734.800)	Perda No.8 tahun.2000 Tanggal .18 Oktober 2000 Diundangkan Tgl. 23 Oktober 2000 Nomor 15 Tahun 2000
019	Retribusi Rumah Potong Hewan	66.000.000	62.841.300	(3.158.700)	Perda No.6 tahun.2000 Tanggal .8 September 2000 Diundangkan Dengan LD.Tgl. 9 September 2000 Nomor 11 Tahun 2000
021	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	82.000.000	122.897.825	40.897.825	Perda No.4 tahun.2000 Tanggal .8 September 2000 Diundangkan Tgl. 9 -9 - 2000 Dengan LD Nomor 9 Tahun 2000

1	2	3	4	5	6
024	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.000.000	10.995.000	(1.005.000)	Perda No. 8 tahun 1995 tgl.18-7-95 Disyahkan tgl.16-11-1995 No.188.3/353/95 Diundangkan dengan LD No.6 tanggal 12-2-1996
026	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	150.000.000	218.769.150	68.769.150	Perda No.19 Th.1995 tgl.27-12-1995 Disyahkan tgl.4-7-1996 No.188.3/246/96 Diundangkan dengan LD NO.13 Th.1996 tanggal 5-10-1996 .
028	Retribusi Izin Gangguan	110.000.000	148.322.786	38.322.786	Perda No.2 Th.1999 Tgl.9 april 1999 Disyahkan Kepmendagri tanggal 18 Agustus 1999 No.974.503.33-876 Diundangkan dengan Lembaran Daerah No.8 Th.1999 tgl.9 September 1999
029	Retribusi Izin Trayek	5.000.000	6.425.000	1.425.000	Perda No.19 Tahun 2001 Tanggal 13 Agustus 2001 Diundangkan dengan LD No. 63 tahun 2001 tanggal 14 Agustus 2001

1	2	3	4	5	6
1.2.3	**Pos Bagian Laba Usaha Daerah**	**506.000.000**	**520.976.601**	**14.976.601**	
1.2.3 - 002	Perusahaan Daerah Air Minum	220.000.000	237.971.850	17.971.850	Perda No.3 Th.1986 Tgl.15 Maret 1986 Disyahkan Tanggal 1 Mei 1986 188.3/12/1986 Diundangkan dengan LD Seri B.No. 3 Tgl.23 Mei 1986
003	Perusahaan Daerah Bank Pasar	230.000.000	243.984.150	13.984.150	Perda No.18 Th.1995 Tgl.22 Nopember 1995.Disyahkan Tanggal 3 Juni 1996 No.188.3/143/1996 Diundangkan dengan Lembaran Daerah No.3 Th.1997 Tgl.27 Pebruari 1997
004	Apotik Waringin Mulyo	21.000.000	28.864.475	7.864.475	Perda No.10 th.1990 tgl 22-09-1990 Disyahkan tgl.22-10-1990 No.188.3/391/1990 Diundangkan dengan LD No.3 Tahun 1991 tanggal. 11-5-1991.
1.2.3-005	Badan Kredit Kecamatan (BKK)	35.000.000	10.156.126	(24.843.874)	Perda Prop.Jawa Tengah tgl. 16-4-1981 No.11 tahun.1981 Disyahkan tgl.17-12-1981 No. 581.053-3-884. LD Seri D No.103 Tanggal 24-12-1981
1.2.4	**Pos Lain-lain Pendapatan Yang Sah**	**636.300.000**	**1.185.824.263**	**549.524.263**	
1.2.4 - 001	Hasil Penjualan Milik Daerah	0	0	0	
002	Jasa Giro	605.000.000	965.806.786	360.806.786	Keputusan Direksi PT.Bank BPD Jateng No.0195 / HT 01.01/1999 Tanggal 1-9-1999
030	Penerimaan Lain-lain	31.300.000	220.017.477	188.717.477	Surat Gubernur Jawa Tengah No.903/376 Tanggal 12 Maret 1999

1		2	3	4	5	6
1.3		BAGIAN DANA PERIMBANGAN	**187.658.564.000**	**190.115.369.598**	**2.456.805.598**	
1.3.1.		**Pos Bagi Hasil Pajak**	**5.885.741.000**	**8.483.001.653**	**2.597.260.653**	
1.3.1 -	001	Pajak Bumi dan Bangunan	4.036.656.000	5.875.931.235	1.839.275.235	UU.RI No.12 Th.1985 Ttg PBB LN.RI No.68 Th.1985 Tambahan LN.RI No.3312 .
	002	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	575.567.000	926.514.776	350.947.776	UU No.21 Tahun 1997
	003	Pajak Penghasilan (PPh)	1.273.518.000	1.680.555.642	407.037.642	S K Gubernur Jateng No.tgl.14-5-2001 dan No.31 taaanggal 18 Desember 2001
1.3.2		**Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam**	**168.000.000**	**27.544.945**	**(140.455.055)**	
1.3.2 -	001	Iuran Hasil Hutan (IHH)	10.000.000	1.422.179	(8.577.821)	Keputusan Presiden Republik Indonesia No.10 Tahun 1990
	002	Iuran Hak Pengusahaan Hutan	150.000.000	0	(150.000.000)	SK.Men.Hut.RI No.166/KPTS-11/2001 Tanggal 7 Juni 2001
	008	Minyak Bumi	8.000.000	26.122.766	18.122.766	SK.Men.Keu.RI No.S.2575/LK/2001 Tanggal 14 Juni 2001

1		2	3	4	5	6
1.3.3		**Pos Dana Alokasi Umum**	**181.604.823.000**	**181.604.823.000**	**0**	
1.3.3 -	001	Dana Alokasi Umum	181.604.823.000	181.604.823.000	0	SK.Men.Keu.RI No.451/KMK.07/2001 Tanggal 23 Juli 2001
1.3.4		**Pos Dana Alokasi Umum**	**0**	**0**	**0**	
1.3.4 -	001	Dana Alokasi Khusus	0	0	0	
1.4		**BAGIAN PINJAMAN DAERAH**	**24.323.408.000**	**14.000.000.000**	**(10.323.408.000)**	
1.4.1		**Pos Pinjaman Dalam Negeri**	**24.323.408.000**	**14.000.000.000**	**(10.323.408.000)**	
	002	Pinjaman dari Bank	17.537.338.000	14.000.000.000	(3.537.338.000)	SK.DPRD Kabupaten Temanggung No.DPRD.47/4-111/2001 Tanggal 20 September 2001
	005	Pinjaman dari sumber lainnya	6.786.070.000	0	(6.786.070.000)	SK.DPRD Kabupaten Temanggung No.DPRD.47/4-111/2001 Tanggal 20 September 2001
1.4.2		**Pos Pinjaman Luar Negeri**	0	0	0	

1	2	3	4	5	6
1.5	**BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH**	**6.221.536.000**	**10.402.285.331**	**4.180.749.331**	
1.5.2	**Pos Penerimaan dari Propinsi**	**6.221.536.000**	**10.402.285.331**	**4.180.749.331**	
001	Bantuan Pembangunan Dari Dati I (2 P.0.A)	2.095.578.000	2.095.577.600	(400)	
004	Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	1.300.000.000	2.150.709.187	850.709.187	PP No.21 Tahun 1997
006	Penerimaan Sebagian PAD Propinsi	1.200.000.000	3.556.568.000	2.356.568.000	SK.Gubernur Jateng Nomor903/483/2001 Tanggal 7 Maret 2001
007	Penerimaan Hak Atas Tanah Negara	22.500.000	26.921.875	4.421.875	UU No.25 Tahun 1999 jo PP No.104 Tahun 2000
008	Subsidi Gaji untuk Eks. Cabang Dinas	1.603.458.000	2.572.508.669	969.050.669	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (BAGIAN 1.1 s.d. 1.5)	**233.207.369.000**	**230.611.228.900**	**(2.596.140.100)**	

1.5. BAGIAN UKP .....

1		2	3	4	5	6
1.5		**BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN**	**10.003.319.000**	**14.930.453.949**	**4.927.134.949**	
1.5.1		**Pos Urusan Kas & Perhitungan**	**10.003.319.000**	**14.930.453.949**	**4.927.134.949**	
1.5.1 -	001	Iuran Wajib Pegawai	4.835.590.000	9.515.063.419	4.679.473.419	
	003	Penerimaan Pajak Penghasilan	4.667.277.000	4.799.944.530	132.667.530	
	005	Penerimaan Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai	500.452.000	615.446.000	114.994.000	

RINGKASAN

1	2	3	4	5	6
1.1.	**BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU**	**4.898.898.000**	**4.898.898.511**	**511**	
1.1.1.	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	4.898.898.000	4.898.898.511	511	
1.2.	**BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**10.104.963.000**	**11.194.675.460**	**1.089.712.460**	
1.2.1	Pos Pajak Daerah	2.086.000.000	2.487.562.685	401.562.685	
1.2.2	Pos Retribusi Daerah	6.876.663.000	7.000.311.911	123.648.911	
1.2.3	Pos Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah	506.000.000	520.976.601	14.976.601	
1.2.4	Pos Lain - lain Pendapatan Yang Sah	636.300.000	1.185.824.263	549.524.263	
1.3.	**BAGIAN DANA PERIMBANGAN**	**187.658.564.000**	**190.115.369.598**	**2.456.805.598**	
1.3.1	Pos Bagi Hasil Pajak	5.885.741.000	8.483.001.653	2.597.260.653	
1.3.2	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	168.000.000	27.544.945	(140.455.055)	
1.3.3	Pos Dana Alokasi Umum	181.604.823.000	181.604.823.000	0	
1.3.4	Pos Dana Alokasi Khusus	0	0	0	

1	2	3	4	5	6
1.4	**BAGIAN PINJAMAN DAERAH**	**24.323.408.000**	**14.000.000.000**	**(10.323.408.000)**	
1.4.1	Pos Pinjaman Dalam Negeri	24.323.408.000	14.000.000.000	(10.323.408.000)	
1.4.2	Pos Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	
1.5	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	6.221.536.000	10.402.285.331	4.180.749.331	
1.5.2	Pos Penerimaan dari Propinsi	6.221.536.000	10.402.285.331	4.180.749.331	
	JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (1.1 S.D 1.5)	233.207.369.000	230.611.228.900	(2.596.140.100)	
1.6	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	10.003.319.000	14.930.453.949	4.927.134.949	

LAMPIRAN : C / I
PERDA NO. :
TANGGAL :

PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN
2002

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2002

AB I : PENDAPATAN

LAMPIRAN : A . I

KODE NGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA BRUTTO)	LEBIH (KURANG)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	14.422.217.000	14.422.217.546	546	
.1	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	14.422.217.000	14.422.217.546	546	
.1 - 000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang lalu	14.422.217.000	14.422.217.546	546	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2002 Tanggal 8 Mei 2002
	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.291.015.000	18.021.899.978	1.730.884.978	
.1	Pos Pajak Daerah	2.662.500.000	3.099.189.649	436.689.649	
.1 - 006	Pajak Hotel	42.000.000	42.098.100	98.100	Perda No.6 Tahun 1998 Tgl. 29 September 1998 Disyahkan dengan Kepmendagri No. 973.33 - 054 Tgl.24 Pebruari 1999 Diundangkan dalam Lembara Daerah Nomor 2 Tahun 1999 Tgl. 5 April 1999
007	Pajak Restoran	38.000.000	39.151.470	1.151.470	Perda No.6 Tahun 1998 Tgl. 29 September 1998 Disyahkan dengan Kepmendagri No.979.3-054 Tgl.24 Pebruari 1999
008	Pajak Hiburan	20.000.000	22.297.245	2.297.245	Perda No.7 Tahun 1998 Tgl.29 September 1998 Disyahkan dengan Kepmendagri No.973.3-054 Tgl.24 Pebruari 1999
009	Pajak Reklame	90.000.000	90.026.111	26.111	Perda No. 8 Tahun 1998 Tgl. 29 September 1998 Disyahkan dengan Kepmendagri Nomor 973.3-054 Tanggal 24 Pebruari 1999.
010	Pajak Penerangan Jalan	2.465.000.000	2.897.347.676	432.347.676	Perda No.9 Tahun 1998 Tgl.29 September 1998 Disyahkan dengan Kepmendagri No.973.3-054 Tgl.24 Pebruari 1999

1	2	3	4	5	6
2.2 - 008	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	450.000.000	451.017.900	1.017.900	Perda No. 18 Tahun 2001 Tanggal 14 Agustus 2001 Diundangkan Tgl. 14 Agustus 2001 No. 62 Th. 2001
011	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	352.880.000	363.364.500	10.484.500	Perda No. 1 Th. 2002 Tgl. 5-2-2002 diundangkan dng Tgl. 5 - 2 - 2002 No. 6 No. 1 Tahun 2002
014	Retribusi Terminal	200.000.000	205.409.200	5.409.200	Perda No. 5 Tahun 2000 Tgl. 8 September 2000 Diundangkan Tgl.23 Sep 2000 No. 15 Tahun 2000
015	Tempat Khusus Parkir	80.000.000	86.877.000	6.877.000	Perda No. 8 Tahun 2000 Tgl. 18 Oktober 2000 Diundangkan Tgl.23 Okt.2000 No. 15 Tahun 2000
018	Retribusi Rumah Potong Hewan	75.000.000	69.075.300	(5.924.700)	Perda No. 6 Tahun 2000 Tgl. 8 September 2000 Diundangkan Tgl.9 Sep 2000 No. 11 Tahun 2000
021	Retribusi Tempat Rekreasi	100.000.000	104.522.540	4.522.540	Perda No.4 Tahun 2000 Tgl. 8 September 2000 Diundangkan Tgl 9 Sept. 2000 No. 9 Tahun 2000
023	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000.000	14.205.000	(795.000)	Surat Gubernur KDH TK. I Jateng No. 903/376 Tanggal 12 Maret 1999
024	Retribusi Ijin Bangunan	225.000.000	251.162.695	26.162.695	Perda Nomor 19 Tahun 1995 Tanggal.27-12-1995 Disyahkan Tgl. 4 Juli 1996 No. 188.3/246/1996 Diundangkan Tgl. 27 Feb.1997 LD No. 5 Th. 1997
026	Retibusi Izin Gangguan	200.000.000	528.745.138	328.745.138	Perda No. 2 Th. 1999 Tgl. 9 April 1999 Disyahkan Kepmendagri Tgl.18-8-1999 No.974.503.33-876 Diundangkan dengan Lembaran Daerah Perda No. 8 Th. 1999 Tgl. 9 September 1999.
027	Retribusi Ijin Trayek	30.000.000	40.619.000	10.619.000	Perda No. 19 Tahun 2001 Tgl. 13 Agustus 2001 Diundangkan Tgl 14 Agustus 2001 No. 63 Th. 2001
028	Retribusi Ijin Penebangan dan Pengangkutan Kayu Diluar Kawasan Hutan Kab. Temanggung	100.000.000	207.723.003	107.723.003	Perda Nomor 8 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002 Diundang dlm LD Th. 2002 No. 40 Tgl. 9-7-2002

1		2	3	4	5	6
	011	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galia Golongan C	7.500.000	8.269.047	769.047	Perda No. 4 Tahun 1998 Tgl. 9 Juni 1998 Disyahkan dengan Kepmendagri No.973.3-836 Tgl.25 September 1998 Diundangkan LD Seri B.1 No. 11 Tahun 1998 Tanggal 8 Oktober 1998
2		Pos Retribusi Daerah	10.975.153.000	10.569.224.714	(405.928.286)	
2 -	001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.470.733.000	6.458.636.388	(1.012.096.612)	- Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Kab. Tmg. Perda. No. 21 Th. 2001 Tgl. 18-9-2001 Diundangkan dlm LD No.69 Th.2001 Tgl.19-10-2001 - Perda No. 7 Th. 2002 Tgl. 17-6-2002 Diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 39 Tahun 2002 Tangal 9 Juli 2002
	002	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	175.000.000	178.998.500	3.998.500	Perda No.17 Th.2001 Tgl. 13-8-2001 diundangkan dng LD No.61 Tahun 2001 Tgl.14-8-2001
	003	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	320.000.000	319.368.500	(631.500)	Perda No.20 Tahun. 1994 Tgl. 5 Desember 199 Disyahkan Tgl. 18-5-1995 No.188.3/123/199 Diundangkan dengan LD. Seri B.3 No. 11 Th. 1995 Tanggal 13 Juni 1995
	004	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengubura Mayat	10.000.000	5.358.000	(4.642.000)	Perda No. 13 Tahun. 1994 Tgl. 21 September 199 Disyahkan Tgl. 3-2-1995 No.188.3/12/9 Diundangkan dengan LD. Seri B.1 No. 1 Th. 1995 Tanggal 22 Pebruari 1995
	005	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	171.540.000	177.254.500	5.714.500	Perda No. 7 Tahun 2000 Tgl. 18 Oktober 200 Diundangkan Tgl 23 Oktober 2000 No14 Tahun 2000
	006	Retribusi Pasar	1.000.000.000	1.106.887.550	106.887.550	Perda Nomor 2 Tahun 2001 Tanggal. 21 April 200 Diundangkan No. 7 Th. 2001 Tgl. 17 April 200

1		2	3	4	5	6
.2.3		Pos Bagian Laba Usaha Daerah	1.250.862.000	1.257.069.200	6.207.200	
1.2.3 -	001	Bank Pembangunan Daerah	542.000.000	542.343.679	343.679	
	002	Perusahaan Daerah Air Minum	250.000.000	251.076.450	1.076.450	Perda No. 3 Tahun 1986 Tgl. 15 Maret 2001 Disahkan Tgl. 1-5-1986 No. 188.3 / 12 / 86 Lembaran Daerah Seri B No. 3 Tanggal 23-5-1986
	003	Perusahaan Daerah " Bank Pasar "	370.362.000	371.000.000	638.000	Perda No. 18 Th. 1995 Tgl. 22 Nopember 1995 Disahkan Tanggal 4 Juli 1996 No. 188.3/143/1996 Diundangkan Tgl. 27 - 2 - 1997 LD No. 5 Th. 1997
	004	Apotik Waringin Mulyo	26.000.000	30.064.334	4.064.334	Perda No. 10 Th. 1990 Tgl. 22 September 1990 Disahkan Tanggal 22-10-1990 No. 188.3/391/1990 Diundangkan Tgl. 11-5-1991 Seri D LD No. 3 Th.199
	005	Badan Kredit Kecamatan (BKK)	50.000.000	50.046.087	46.087	Perda Prop. Dati I Jateng Tgl.16 April 1981 No. 11 Th. 1981 Disahkan Tgl. 17 Desember 1981 No. 581.053-3-884 LD Seri D No. 3 Tgl 24-12-1981
	006	Perusahaan Daerah " Aneka Usaha "	12.500.000	12.538.650	38.650	Perda No. 20 Tahun 2001 Tgl. 13 Agustus 2001 Diundangkan LD No. 64 Th. 2001 Tg. 14 - 8 - 2001
.2.4		Pos Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.402.500.000	3.096.416.415	1.693.916.415	
.2.4 -	001	Hasil Penjualan Milik Daerah	35.000.000	90.550.000	55.550.000	
	002	Jasa Giro	1.310.000.000	2.063.025.955	753.025.955	Keputusan Direksi PT. Bank BPD Jateng No. 0195/HT 01.01/1999 Tgl. 1-9-1999
	004	Penerimaan Radio Temanggung	17.500.000	17.590.000	90.000	
	005	Penerimaan Angsuran TP-TGR	5.000.000	10.430.000	5.430.000	
	030	Penerimaan Lain-lain	35.000.000	914.820.460	879.820.460	Surat Gubernur KDH Tk. I Jateng No. 903/376 Tanggal 12 Maret 1999

1	2	3	4	5	6
1.3	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	205.965.839.000	208.439.477.062	2.473.638.062	
1.3.1	Pos Bagi Hasil Pajak	8.887.939.000	11.302.693.058	2.414.754.058	
1.3.1 - 001	Pajak Bumi dan Bangunan	5.767.939.000	7.845.561.069	2.077.622.069	UU.RI No.12 Th.1985 Tentang PBB LN RI No.68 Th.1985 Tambahan LN RI No. 3312
002	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.120.000.000	1.118.154.444	(1.845.556)	Perda Tingkat I Jawa Tengah
003	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh)	2.000.000.000	2.338.977.545	338.977.545	
1.3.2	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	467.900.000	526.784.004	58.884.004	
1.3.2 - 002	Iuran Hak Pengusahaan Hutan	150.000.000	387.192.578	237.192,578	
005	Iuran Kuasa Usaha Pertambangan	7.900.000	22.160.537	14.260.537	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/KMK.06/2002 Tanggal 7 Mei 2002.
007	Pungutan Hasil Perikanan	300.000.000	103.337.753	(196.662.247)	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/KMK.06/2002 Tanggal 7 Mei 2002.
008	Minyak Bumi	10.000.000	14.093.136	4.093.136	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/KMK.06/2002 Tanggal 7 Mei 2002.
1.3.3	Pos Dana Alokasi Umum	196.610.000.000	196.610.000.000	0	
1.3.3 - 001	Dana Alokasi Umum	196.610.000.000	196.610.000.000	0	Keppres. No.131 Th. 2001 Tgl. 31 Desember 2001
1.3.4	Pos Dana Alokasi Khusus	0		0	
1.3.4 - 001	Dana Alokasi Khusus	0	0	0	

1	2	3	4	5	6
4	BAGIAN PINJAMAN DAERAH	17.000.000.000	11.457.267.650	(5.542.732.350)	
4.1	Pos Pinjaman Dalam Negeri	17.000.000.000	11.457.267.650	(5.542.732.350)	
4.1 - 002	Pinjaman dari Bank	17.000.000.000	11.457.267.650	(5.542.732.350)	
4.1	Pos Pinjaman Dalam Negeri	0		0	
5	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	15.330.162.000	18.408.442.776	3.078.280.776	
5.1	Pos Penerimaan dari Pemerintah Pusat	3.990.000.000	3.988.006.500	(1.993.500)	
5.1 - 001	Dana Penyeimbang	2.140.000.000	2.140.000.000	0	Keppres. No.131 Th. 2001 Tgl. 31 Desember 2001
002	Penangan Bencana Alam	1.850.000.000	1.848.006.500	(1.993.500)	SKOR Men. Keu. No. 667/KM.3-43/SKOR/2002 Tgl. 23 Agustus 2002.
5.2	Pos Penerimaan dari Propinsi	11.340.162.000	14.420.436.276	3.080.274.276	
5.2 - 001	Bantuan Pembangunan dari Provinsi (2P.O.A)	2.821.662.000	4.593.385.500	1.771.723.500	
004	Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	2.150.000.000	1.926.281.766	(223.718.234)	Perda Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 7 Maret 2001
005	Sewa Tanah dan Bangunan dari Provinsi	2.400.000	3.030.710	630.710	
006	Penerimaan PKB / BBNKB	3.858.600.000	5.424.287.000	1.565.687.000	
007	Penerimaan Hak Atas Tanah Negara	20.000.000	15.951.300	(4.048.700)	
009	Pajak Pemanfaatan ABT dan APT	30.000.000	0	(30.000.000)	
010	Biaya Untuk Penangan Bencana Alam	637.500.000	637.500.000	0	SK. Gub. Jateng No. 360/1/2002 Tgl. 19-02-2002
010	Instuksi Gubernur Jawa Tengah (In. Gub.)	1.820.000.000	1.820.000.000	0	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (BAGIAN 1.1 s.d. 1.5)	269.009.233.000	270.749.305.012	1.740.072.012	

1	2	3	4	5	6
	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	15.407.671.000	13.740.091.218	(1.667.579.782)	
	Pos Urusan Kas & Perhitungan	15.407.671.000	13.740.091.218	(1.667.579.782)	
001	Iuran wajib pegawai	9.541.015.000	9.682.861.097	141.846.097	
002	Potongan Beras	0		0	
003	Penerimaan Pajak Penghasilan	5.246.820.000	3.425.994.121	(1.820.825.879)	
004	Penerimaan Amal Bhakti KORPRI	0		0	
005	Potongan Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai	619.836.000	631.236.000	11.400.000	

KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2002

KODE ANGGARAN	URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1.1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	14.422.217.000	14.422.217.546	546
1.1.1	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	14.422.217.000	14.422.217.546	546
1.2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.291.015.000	18.021.899.978	1.730.884.978
1.2.1	Pos Pajak Daerah	2.662.500.000	3.099.189.649	436.689.649
1.2.2	Pos Retribusi Daerah	10.975.153.000	10.569.224.714	(405.928.286)
1.2.3	Pos Bagian Laba BUMD	1.250.862.000	1.257.069.200	6.207.200
1.2.4	Pos Laian-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.402.500.000	3.096.416.415	1.693.916.415
1.3	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	205.965.839.000	208.439.477.062	2.473.638.062
1.3.1	Pos Bagian Hasil Pajak	8.887.939.000	11.302.693.058	2.414.754.058
1.3.2	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	467.900.000	526.784.004	58.884.004
1.3.3	Pos Dana Alokasi Umum	196.610.000.000	196.610.000.000	0
1.3.4	Pos Dana Alokasi Khusus	0	0	0
1.4	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	17.000.000.000	11.457.267.650	(5.542.732.350)
1.4.1	Pos Pinjamam Dalam Negeri	17.000.000.000	11.457.267.650	(5.542.732.350)
1.4.2	Pos Pinjaman Luar Negeri	0	0	0
1.5	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	15.330.162.000	18.408.442.776	3.078.280.776
1.5.2	Pos Penerimaan dari Pemerintah Pusat	3.990.000.000	3.988.006.500	(1.993.500)
1.5.2	Pos Penerimaan dari Propinsi	11.340.162.000	14.420.436.276	3.080.274.276
	JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (1.1 S/D 1.5)	269.009.233.000	270.749.305.012	1.740.072.012
1.6.1	Pos Urusan Kas dan Perhitungan	15.407.671.000	13.740.091.218	(1.667.579.782)

LAMPIRAN : III.A
PERDA NO. :
TANGGAL :

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN
2003

PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2003

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERLEBIH (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	302.778.690.000	291.371.529.778	(11.407.160.222)	
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.971.745.000	18.580.063.661	(16.391.681.339)	
1 1 1	PAJAK DAERAH	3.518.000.000	3.935.259.974	417.259.974	
1 1 1 01	**Pajak Hotel**	47.500.000	48.888.300	1.388.300	
1 1 1 01 01	Pajak Hotel	47.500.000	48.888.300	1.388.300	Karena adanya intensifikasi pemungutan melalui peninjauan ulang tarip.
1 1 1 02	**Pajak Restoran**	50.000.000	50.920.500	920.500	Karena adanya pendataan WP baru dan intensifikasi pemungutan.
1 1 1 02 01	Pajak Restroran	50.000.000	50.920.500	920.500	
1 1 1 03	**Pajak Hiburan**	23.500.000	23.940.625	440.625	
1 1 1 03 01	Pajak Hiburan	23.500.000	23.940.625	440.625	
1 1 1 04	**Pajak Reklame**	90.000.000	87.344.469	(2.655.531)	
1 1 1 04 01	Pajak Reklame	90.000.000	87.344.469	(2.655.531)	
1 1 1 05	**Pajak Penerangan Jalan**	3.300.000.000	3.715.882.490	415.882.490	Karena adanya kenaikan Tarif dasar Listrik dan penambahan
1 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan	3.300.000.000	3.715.882.490	415.882.490	pemakaian daya
1 1 1 06	**Pajak Pengambilan Bahan Galian GoL.C**	7.000.000	8.283.590	1.283.590	Karena adanya Wajib Pajak baru dari pengurukan tanah untuk
1 1 1 06 01	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	7.000.000	8.283.590	1.283.590	pembangunan Pabrik Kayu lapis
1 1 2	RETRIBUSI DAERAH	12.567.450.000	10.810.242.634	(1.757.207.366)	
1 1 2 01	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**	8.370.000.000	6.267.732.904	(2.102.267.096)	
1 1 2 01 01	Penerimaan Puskesmas	820.000.000	687.403.475	(132.596.525)	Karena kondisi ekonomi yang kurang kundusif sehingga masyarakat banyak yang memanfaatkan JPSBK.
1 1 2 01 02	Rumah Sakit Umum	7.500.000.000	5.531.914.429	(1.968.085.571)	Karena kunjungan pasien Rawat Inap kurang dari rencananya disebabkan letaknya kurang strategis serta belum adanya tenaga dokter spesialis anestesi dan ortopedi, sehingga pasien banyak dirujuk ke RS Swasta.
1 1 2 01 03	Calon Mempelai	50.000.000	48.415.000	(1.585.000)	

1	2	3	4	5	6
1 1 2 02	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**	190.000.000	209.275.550	19.275.550	
1 1 2 02 01	Rumah Tangga	110.000.000	119.400.350	9.400.350	Karena adanya ekstensifikasi melalui penambahan lokasi wajib pungut retribusi
1 1 2 02 02	Kantor Perusahaan	15.000.000	20.517.500	5.517.500	
1 1 2 02 03	Pasar	65.000.000	69.357.700	4.357.700	
1 1 2 03	**Retribusi Pelayanan Kependdkan dan Capil**	395.000.000	444.887.000	49.887.000	
1 1 2 03 01	Pelayanan Kependudukan	275.000.000	345.517.500	70.517.500	Karena adanya peningkatan pelayanan KTP di Kecamatan.
1 1 2 03 02	Akte Catatan Sipil	120.000.000	99.369.500	(20.630.500)	Karena kurang kesadaran masyarakat utk memiliki akte kelahiran
1 1 2 04	**Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat**	10.000.000	5.180.000	(4.820.000)	
1 1 2 04 01	Permintaan/Perpanjangan Tanah Kubur	10.000.000	5.180.000	(4.820.000)	
1 1 2 05	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	225.000.000	227.774.100	2.774.100	Karena adanya penambahan lokasi parkir baru.
1 1 2 05 01	Parkir di Ruas-ruas Jalan	225.000.000	227.774.100	2.774.100	
1 1 2 06	**Retribusi Pasar**	1.400.000.000	1.519.118.150	119.118.150	Karena adanya permohonan ijin baru dan intensifikasi pemungutan
1 1 2 06 01	Pasar Temanggung	685.000.000	722.567.550	37.567.550	
1 1 2 06 02	Pasar Parakan	299.000.000	330.722.300	31.722.300	
1 1 2 06 03	Pasar Ngadirejo	218.000.000	228.830.750	10.830.750	
1 1 2 06 04	Pasar Kranggan	102.000.000	120.810.400	18.810.400	
1 1 2 06 05	Pasar Pingit	66.000.000	84.097.250	18.097.250	
1 1 2 06 06	Pasar Candiroto	30.000.000	32.089.900	2.089.900	
1 1 2 08	**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**	450.000.000	450.257.500	257.500	
1 1 2 08 01	Pengujian Kendaraan Bermotor	450.000.000	450.257.500	257.500	
1 1 2 011	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	91.800.000	109.961.600	18.161.600	
1 1 2 011 01	Sewa Rumah Makan Ngesti Roso	6.600.000	6.600.000	0	
1 1 2 011 02	Sewa Mesin Gilas	45.000.000	56.800.000	11.800.000	Karena meningkatnya pembangunan fisik yang menggunakan mesin gilas.
1 1 2 011 03	Sewa Gedung Olah Raga	27.500.000	27.683.500	183.500	
1 1 2 011 04	Sewa Tanah Bengkok Kelurahan	9.700.000	15.500.000	5.800.000	Karena adanya pembayaran pelunasan lelang tanah bengkok.
1 1 2 011 05	Sewa Tanah-tanah Lambiran Pengairan	3.000.000	3.378.100	378.100	
1 1 2 014	**Retribusi Terminal**	250.000.000	253.776.200	3.776.200	
1 1 2 014 01	TPR Bus	184.680.000	188.001.600	3.321.600	Karena adanya optimalisasi pemungutan Retribusi TPR
1 1 2 014 02	TPR Angkudes	65.320.000	65.774.600	454.600	
1 1 2 015	**Retribusi Khusus Parkir**	100.000.000	101.566.800	1.566.800	
1 1 2 015 01	Tempat Khusus Parkir	100.000.000	101.566.800	1.566.800	Karena penambahan Lokasi tempat parikir baru.

1	1	2	018		**Retribusi Rumah Potong Hewan**	**72.000.000**	**71.923.900**	**(76.100)**	
1	1	2	018	01	Rumah potong hewan	60.000.000	60.048.000	48.000	
1	1	2	018	02	Pemeriksaan Kesehatan Ternak	12.000.000	11.875.900	(124.100)	
1	1	2	021		**Retribusi Tempat Rekreasi**	**110.000.000**	**107.500.600**	**(2.499.400)**	
1	1	2	021	01	Syawalan	22.500.000	22.400.000	(100.000)	
1	1	2	021	02	Pikatan Indah	39.300.000	53.108.000	13.808.000	Karena adanya usaha promosi lewat pentas kesenian
1	1	2	021	03	Tirto Asri	28.800.000	13.515.200	(15.284.800)	Karena fasilitas yang ada sudah banyak yang rusak
1	1	2	021	04	Kawasan Pikatan Indah	8.200.000	9.992.200	1.792.200	
1	1	2	021	05	Kawasan Tirto Asri	6.200.000	4.285.000	(1.915.000)	
1	1	2	021	06	Pedagang Asongan/Penjaja	5.000.000	4.200.200	(799.800)	
1	1	2	023		**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**	**15.000.000**	**15.000.000**	**0**	
1	1	2	023	01	Balai Benih Ikan	10.000.000	12.300.000	2.300.000	
1	1	2	023	02	Kolam Air Deras	5.000.000	2.700.000	(2.300.000)	Karena berkurangnya produktivitas ikan air deras disebabkab oleh virus
1	1	2	024		**Retribusi Ijin Bangunan**	**300.000.000**	**376.681.270**	**76.681.270**	
1	1	2	024	01	Bangunan Perumahan	110.000.000	119.166.920	9.166.920	Karena adanya peningkatan area pelayanan sehingga
1	1	2	024	02	Bangunan Usaha dan Lain-lain	190.000.000	257.514.350	67.514.350	menambah jumlah pemohon IMB
1	1	2	026		**Retribusi Ijin Gangguan**	**219.600.000**	**251.044.199**	**31.444.199**	
1	1	2	026	01	Perpanjangan Ijin Gangguan	219.600.000	251.044.199	31.444.199	Karena adanya pendirian perusahaan besar (kayu dan peternakan)
1	1	2	027		**Retribusi Ijin Trayek**	**30.000.000**	**30.423.500**	**423.500**	
1	1	2	027	01	Retribusi Ijin Trayek	30.000.000	30.423.500	423.500	
1	1	2	028		**Retribusi Ijin Tebang Angkut** ✓	**300.000.000**	**322.494.361**	**22.494.361**	Karena adanya peningkatan produktifitas pengolahan kayu
1	1	2	028	01	Retribusi Ijin Tebang Angkut	300.000.000	322.494.361	22.494.361	dari pabrik
1	1	2	029		**Retribusi Perijinan Bid Perindag** ✓	**14.050.000**	**16.595.000**	**2.545.000**	
1	1	2	029	01	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	2.500.000	3.960.000	1.460.000	
1	1	2	029	02	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	8.050.000	7.780.000	(270.000)	
1	1	2	029	03	Tanda Daftar Industri	3.500.000	4.855.000	1.355.000	
1	1	2	030		**Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi** ✓	**25.000.000**	**29.050.000**	**4.050.000**	
1	1	2	030	01	Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi	25.000.000	29.050.000	4.050.000	Karena meningkatnya pendirian perusahaan usaha jasa konstruksi
1	1	3			**HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASILPENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN**	**1.326.395.000**	**1.244.347.530**	**(82.047.470)**	
1	1	3	01		**Bank Pembangunan Daerah**	**443.000.000**	**443.000.000**	**0**	
1	1	3	01	01	Bank Pembangunan Daerah	443.000.000	443.000.000	0	

1					2	3	4	5	6
1	1	3	02		**Perusahaan Daerah Air Minum**	**250.000.000**	**250.000.000**	**0**	
1	1	3	02	01	Perusahaan Daerah Air Minum	250.000.000	250.000.000	0	
1	1	3	03		**Perusahaan Daerah Bank Pasar**	**441.395.000**	**441.395.000**	**0**	
1	1	3	03	01	Perusahaan Daerah Bank Pasar	441.395.000	441.395.000	0	
1	1	3	04		**Apotik Waringin Mulyo**	**30.000.000**	**30.054.078**	**54.078**	
1	1	3	04	01	Apotik Waringin Mulyo	30.000.000	30.054.078	54.078	
1	1	3	05		**Badan Kredit Kecamatan (BKK)**	**60.000.000**	**27.898.452**	**(32.101.548)**	Karena bagian laba Tahun 2003 belum disetor, penyetoran
1	1	3	05	01	Badan Kredit Kecamatan (BKK)	60.000.000	27.898.452	(32.101.548)	nya menunggu pengesahan perhitungan Neraca, Rugi/Laba Tahun 2003 oleh pemegang saham.
1	1	3	06		**Perusahaan Daerah " Aneka Usaha "**	**102.000.000**	**52.000.000**	**(50.000.000)**	
1	1	3	06	01	Usaha Bidang Pertanian dan Perkebunan	42.000.000	30.000.000	(12.000.000)	Karena pengelolaannya belum profesional.
1	1	3	06	02	Usaha Bidang Percetakan	50.000.000	17.000.000	(33.000.000)	
1	1	3	06	03	Usaha Bidang Perbengkelan	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	
1	1	4			LAIN-LAIN PEDAPATAN YANG SAH	17.559.900.000	2.590.213.523	(14.969.686.477)	
1	1	4	01		**Hasil Penjualan Milik Daerah**	**138.000.000**	**145.810.000**	**7.810.000**	
1	1	4	01	01	Hasil Penjualan Milik Daerah	138.000.000	145.810.000	7.810.000	Karena adanya penjualan aset daerah (bongkaran pasar baru, bongkaran gedung PKK , Kendaraan roda 4)
1	1	4	02		Jasa Giro	1.600.000.000	1.377.426.437	(222.573.563)	
1	1	4	02	01	Jasa Giro	1.600.000.000	1.377.426.437	(222.573.563)	Karena terbatasnya uang Kas Daerah yang tersimpan di Bank.
1	1	4	03		**Sumbangan Pihak Ketiga**	**0**	**0**	**0**	
1	1	4	03	01	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0	
1	1	4	04		**Penerimaan Radio Temanggung**	**19.000.000**	**16.147.200**	**(2.852.800)**	
1	1	4	04	01	Spot	9.500.000	9.908.000	408.000	
1	1	4	04	02	Sponsor	7.600.000	5.748.000	(1.852.000)	Terbatasnya animo masyarakat menggunakan jasa penyiaran
1	1	4	04	03	Pengumuman	1.900.000	491.200	(1.408.800)	dikarenakan masih menggunakan frekuensi AM.
1	1	4	05		**Penerimaan Angsuran TP-TGR**	**5.000.000**	**8.320.000**	**3.320.000**	
1	1	4	05	01	Penerimaan Angsuran TP-TGR	5.000.000	8.320.000	3.320.000	Karena adanya penambahan aset daerah (kendaraan roda 2) yang hilang
1	1	4	06		**Penerimaan Lain-lain**	**15.797.900.000**	**1.042.509.886**	**(14.755.390.114)**	
1	1	4	06	01	Penjualan Drum Aspal	6.500.000	8.530.000	2.030.000	Karena adanya tambahan alokasi dana untuk pembelian aspal.
1	1	4	06	02	Dana Kontribusi bagi Ds Tempat Sber Mata Air yang dikelola PDAM	19.200.000	19.831.425	631.425	
1	1	4	06	03	Penerimaan Inseminasi Buatan	60.000.000	60.000.000	0	

1					2	3	4	5	6
1	2	4	02		**Bantuan Keuangan dari Propinsi**	**976.607.000**	**989.783.350**	**13.176.350**	
1	2	4	02	01	Bantuan Keuangan untuk Pembangunan (2P.0.A)	446.607.000	446.607.000	0	
				02	Penerimaan Dana In-Gub	500.000.000	500.000.000	0	
				03	Bagi hasil Sumbangan Pihak ketiga kayu	30.000.000	43.176.350	13.176.350	SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 103 Tahun 2003
1	2	4	03		**Bagi hasil Retribusi Propinsi**	**327.000.000**	**321.957.850**	**(5.042.150)**	
				01	Retribusi Kelebihan Muatan	327.000.000	321.957.850	(5.042.150)	
1	3	1			LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**15.303.000.000**	**15.303.300.000**	**300.000**	
1	3	1	01		**Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah**	**15.303.000.000**	**15.303.300.000**	**300.000**	
1	3	1	01	01	Bantuan Dana Kontinjensi	0	0	0	
1	3	1	01	02	Dana Penyeimbang	15.303.000.000	15.303.300.000	300.000	

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KANTOR KESATUAN BANGSA

Jalan Setiabudi No. 1 Telp. (0293) 491048 Fax. (0293) 491048 Kode Pos 56212

TEMANGGUNG

Temanggung, 30 Maret 2004

Nomor : 070 / 115 / PMA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan tentang Penelitian / Pelaksanaan Riset / KKL

Kepada :
Yth : Sdr. Kepala Dipenda
Kabupaten Temanggung
DI
TEMANGGUNG

1. Dasar : Surat dari Fakultas Ekonomi UNIVERSITAS SANATA DHARMA Nomor 31/ FE PD I / 51 /III/2004 tanggal 25 Maretr 2004 Perihal Permohonan Ijin Riset /KKL

2. Diberitahukan dengan hormat bahwa di Kantor / Wilayah Saudara akan diadakan KKL / Riset / Survay oleh :

   Nama : ASTHERINA VENDAYANTI
   Pekerjaan : Mahasiswi
   Alamat : Universitas Sanata Dharma

   Maksud dan tujuan mengadakan KKL / Riset / Survay Berjudul :

   " *KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH* "

   Lokasi : Kecamatan Temanggung
   Waktu : Tanggal 29 Maret s/d 29 Juni 2004
   Keterangan : -

3. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dengan adanya kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma – norma yang berlaku di daerah setempat dan melapor kepada kami setelah selesai kegiatan tersebut.

   Demikian untuk menjadikan maklum .

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kasi Penanganan Masalah Aktual

BAMBANG WIDYO UTOMO
NIP. 510 160 266

Tembusan, kepada Yth :
1. Bpk. Bupati Temanggung ;
2. Sdr. Ka. Bappeda Kab. Temanggung ;
3. Camat Temanggung ;
4. Yang bersangkutan ;
5. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 41-42 ☎ (0293) 491032 Temanggung

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070 / 068

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama : Prasetyo Suharjo, SH
Jabatan : Kabag Tata Usaha Dipenda Kab. Temanggung

Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama : Astherina Vendayanti
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan mulai tanggal 29 Maret s/d 19 Juni 2004 telah melaksanakan KKL/ Riset/ Survey dengan judul:

" KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH "

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kabag. Tata Usaha

PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG DIPENDA

PRASETYO SUHARJO,SH
Pembina
NIP. 500.091.686

Tembusan Kepada YTH:
1. Bapak Bupati Temanggung ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Temanggung ;
3. Camat Temanggung ;
4. Yang bersangkutan ;
5. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. A.Yani No. 32 Telp. (0293) 491004 Fax. (0293) 491040 Kode Pos 56216
TEMANGGUNG

SURAT KETERANGAN
Nomor : 910 / 286 / 2004

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sadwoko Heri Susatyo, SE, MSi

Jabatan : Kabag Keuangan Kab. Temanggung

Dengan ini menerangkan bahwa :

Data yang diambil dalam rangka penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul :

"***KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH***" Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 1999/2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2003 adalah dalam satuan tahun anggaran, oleh karena itu pada data realisasi Pendapatan Asli Daerah sendiri dan bagi hasil pajak/bukan pajak Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 1999/2000 yang hanya 9 bulan (1 April 1999 s/d 31 Desember 1999) merupakan data 1 tahun anggaran sehingga dapat dipakai untuk membandingkan dengan tahun anggaran sesudahnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 6 September 2004

KEPALA BAGIAN KEUANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG SETDA

SADWOKO HERI SUSATYO, SE, MSi
NIP : 500.091.414